

**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*,
PROFITABILITAS DAN KARAKTER EKSEKUTIF
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan *Property, Real Estate*, dan
Building Construction Yang Listing di BEI Tahun 2011-2015)**



Oleh :

Nama : Nurike Rahma Yunia

No. Mahasiswa : 12312468

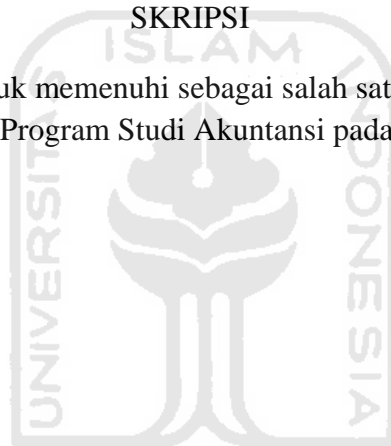
**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**

**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*,
PROFITABILITAS DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)**

(Studi Empiris Pada Perusahaan *Property, Real Estate*, dan *Building Construction*
Yang Listing di BEI Tahun 2011-2015)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII



Oleh :

Nama : Nurike Rahma Yunia

No. Mahasiswa : 12312468

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

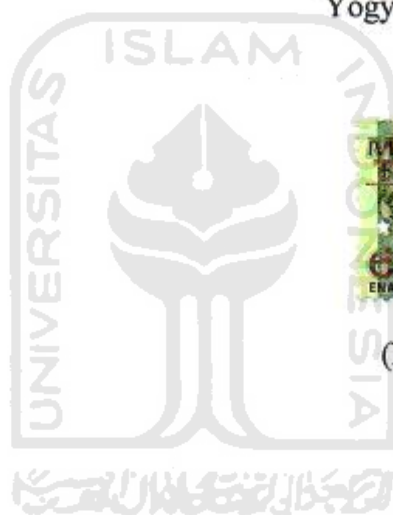
“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini dan disebutkan oleh referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 6 September 2016

Penulis



(Nurike Rahma Yunia)



**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*,
PROFITABILITAS DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)**

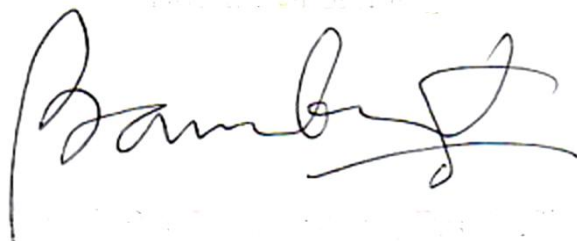
**(Studi Empiris Pada Perusahaan *Property, Real Estate*, dan
Building Construction Yang Listing di BEI Tahun 2011-2015)**

SKRIPSI



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 6 September 2016



Kesit Bambang Prakosa, Drs. M.Si

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS DAN
KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)**

Disusun Oleh : **NURIKE RAHMA YUNIA**

Nomor Mahasiswa : **12312468**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 17 Oktober 2016

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si.

Penguji : Arief Bahtiar, Drs., MSA., Ak., CA., SAS.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
Kuucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,
Ku persembahkan karya kecil ini teruntuk:

Untuk kedua orang tuaku tercinta

*Yang tidak pernah berhenti menghaturkan doa dalam tiap hembusan nafas di tiap
sujudnya, serta selalu memberikan cinta dan kasih sayangnnya kepadaku*

*Yang selalu memberikan semangat, nasihat dan motivasi untuk terus dapat
menyelesaikan studiku selama ini*

Adik-adikku tersayang

Ressy Dwiki Rahmadhani dan Nurwidha Rahma Yonata

Yang selalu memberikan dukungan moril kepadaku

Seluruh keluarga besar dan seluruh sahabat

Atas dukungannya selama ini

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk melihat kebesaran Allah SWT.

Penelitian berjudul **“Analisis Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris Pada Perusahaan *Property, Real Estate*, dan *Building Construction* Yang Listing di BEI Tahun 2011-2015)”** disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Hadi Sutjipto dan Marmiati, adik-adikku Ressay dan Yona, serta seluruh keluarga atas kasih sayang, dukungan semangat, nasihat, kesabaran dan pengorbanan luar biasa, semoga penulis dapat membanggakan kalian.

2. Bapak Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan nasehat yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ir. H. Harsoyo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
4. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII, beserta Bapak Ibu staf pengajar dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Teman-teman seperjuangan selama di Yogyakarta yang selalu setia menemani, membantu dan memberi dukungan kepada penulis Linda, Kunthi, Leta, Hani, Cici, Ine, Bibah. Terima kasih atas semua kenangan selama ini. *See you on top guys!*
7. Teman-teman semasa SMA, Rindy, Vina, Sekly, Finda, Welly, Indy, dan Desy yang selalu memberi semangat dari jauh dan mau menjadi tempat berbagi keluh kesah hehe *miss you my girls.*
8. Teman-teman KKN PWJ-301, Mas Reza, Mas Luthfi, Mbak Wulan, Fikri, Taufiq, Yuni dan Ika terima kasih atas pengalaman berharganya, semoga kedepannya kita dapat menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat.

9. Keluarga besar Akuntansi angkatan 2012, terima kasih atas semangat dan persahabatan selama ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang telah membantu peneliti dalam segala hal. Dalam hal ini, peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna namun demikian semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para peneliti berikutnya.

Wassalamualaikum wr.wb



Penulis

(Nurike Rahma Yunia)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
<i>Abstract</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN	9
1.4 MANFAAT PENELITIAN	9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 LANDASAN TEORI	12
2.1.1 <i>Theory Agency</i>	12
2.1.2 <i>Tax Avoidance</i>	15
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	17

2.1.3.1	Kualitas Audit	20
2.1.3.2	Komite Audit	22
2.1.3.3	Kompensasi Eksekutif	23
2.1.4	Profitabilitas	24
2.1.5	Karakter Eksekutif	25
2.2	PENELITIAN TERDAHULU	27
2.3	HIPOTESIS PENELITIAN	33
2.3.1	Hubungan <i>Corporate Governance</i> dengan <i>Tax Avoidance</i> .	33
2.3.2	Hubungan Profitabilitas dengan <i>Tax avoidance</i>	33
2.3.3	Hubungan Karakter Eksekutif dengan <i>Tax avoidance</i>	34
2.4	KERANGKA PENELITIAN	35
BAB III	METODE PENELITIAN	36
3.1	POPULASI DAN SAMPEL	36
3.2	SUMBER DAN METODE PENGUMPULAN DATA	37
3.3	VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	37
3.3.1	Variabel Dependen	37
3.3.2	Variabel Independen	39
3.3.2.1	<i>Corporate Governance</i>	39
3.3.2.2	Profitabilitas	40
3.3.2.3	Karakter Eksekutif	40
3.4	TEKNIK ANALISIS DATA	41
3.4.1	Statistik Deskriptif	42
3.4.2	Uji Model Pengukuran (<i>Outer model</i>)	42

3.4.3 Uji Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	43
3.4.4 Diagram Jalur	43
3.4.5 Uji Hipotesis	44
3.5 HIPOTESA OPERASIONAL	44
3.5.1 <i>Corporate Governance</i>	44
3.5.2 Profitabilitas	44
3.5.3 Karakter Eksekutif	45
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	46
4.1 HASIL PENGUMPULAN DATA	46
4.2 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF	47
4.3 UJI <i>OUTER MODEL</i>	51
4.4 UJI <i>INNER MODEL</i>	52
4.5 UJI HIPOTESIS	53
4.6 PEMBAHASAN	57
4.6.1 Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	57
4.6.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	58
4.6.3 Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 SIMPULAN	61
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN	61
5.3 SARAN	62
5.4 IMPLIKASI PENELITIAN	623
DAFTAR REFERENSI	64
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2015	1
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	30
4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	46
4.2 Hasil Statistik Deskriptif	47
4.3 Hasil Uji <i>Outer Model</i>	52
4.4 Hasil Uji <i>Inner Model</i>	53
4.5 Signifikansi Hubungan antar Variabel	55
4.6 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	59



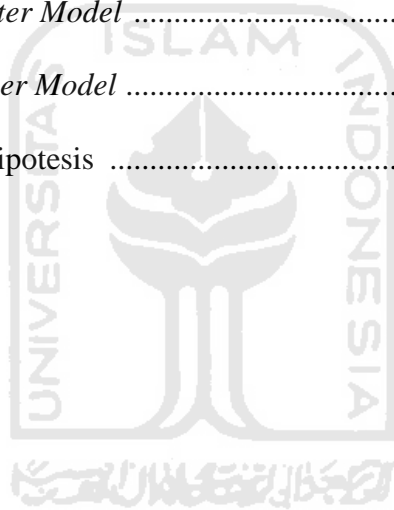
DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	35
3.1 Model Analisis Diagram Jalur	43
4.1 Hubungan antar Konstruk	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sampel Perusahaan	66
Lampiran 2 : Data Variabel Penghindaran Pajak	67
Lampiran 3 : Data Variabel Kualitas Audit	72
Lampiran 4 : Data Variabel Komite Audit	73
Lampiran 5 : Data Variabel Kompensasi Eksekutif	74
Lampiran 6 : Data Variabel ROA	77
Lampiran 7 : Data Variabel Karakter Eksekutif	82
Lampiran 8 : Hasil Uji <i>Outer Model</i>	83
Lampiran 9 : Hasil Uji <i>Inner Model</i>	84
Lampiran 10 : Hasil Uji Hipotesis	85



ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance, profitability and executive's character on tax avoidance in companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011-2015. The element of corporate governance consist an audit quality, audit committee and executive's compensation as well as the elements of profitability is return on assets and the last variable is an executive's character.

This study use quantitative research design and secondary data from property, real estate, dan building construction companies in the observation period 2011-2015. The samples obtained 25 companies were selected by using purposive sampling. This analysis using Structural Equation Model (SEM) and support by software SmartPLS 2.0, the result of this study indicate that corporate governance and executive's character have positive effect on tax avoidance. While the profitability have negative effect on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, corporate governance, audit quality, audit committee, executive's compensation, profitability, ROA, executive's character.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Elemen dari *corporate governance* berisi kualitas audit, komite audit dan kompensasi eksekutif, sedangkan profitabilitas berisi *return on assets* dan variabel terakhir adalah karakter eksekutif.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dan data sekunder dari perusahaan *property, real estate dan building construction* dalam periode pengamatan 2011-2015. Sampel yang dibangun adalah 25 perusahaan yang dipilih dengan *purposive sampling*. Analisa ini menggunakan Struktural Equation Model (SEM) dengan bantuan *software SmartPLS 2.0*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor *corporate governance* dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, faktor profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, *corporate governance*, kualitas audit, komite audit, kompensasi eksekutif, profitabilitas, ROA, karakter eksekutif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di Indonesia penerimaan negara dari sektor pajak menduduki presentase paling tinggi dibandingkan sumber penerimaan yang lain. Berikut data realisasi penerimaan negara selama tiga tahun terakhir yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik awal tahun 2016;

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013-2015
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2013	%	2014	%	2015	%
Penerimaan Perpajakan	1.077.306,70	75,23	1.146.865,80	74,21	1.489.255,50	84,70
Penerimaan Bukan Pajak	354.751,90	24,77	398.590,50	25,79	269.075,40	15,30
Jumlah / Total	1.432.058,60	100	1.545.456,30	100	1.758.330,90	100

Sumber: www.bps.go.id

Dari uraian tabel tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen penerimaan negara didapat dari pajak. Sampai saat ini sektor pajak merupakan penopang utama Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang berarti pajak merupakan sumber pokok pemerintahan. Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan insfrastruktur, biaya kesehatan, biaya pendidikan, pembayaran para pegawai negara serta pembangunan fasilitas publik. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak pula fasilitas dan insfrastruktur yang dibangun. Begitu besarnya peran pajak bagi negara sehingga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak

dengan melakukan reformasi peraturan perpajakan pada tahun 2008 kemudian menghasilkan revisi UU No. 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun pajak melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya.

Belakangan ini sedang marak kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito (2015), dalam sebuah diskusi dengan perwakilan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan *Multinational Corporates (MNCs)* mengungkapkan bahwa masih ada *MNCs* yang menggunakan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan baik negara maupun negara tujuan investasi. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya pengurangan beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Dewi & Jati, 2014). Dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi kemudian mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit, dan salah satu manajemen pajak yang dilakukan adalah dengan penghindaran pajak.

Di Indonesia peristiwa penghindaran pajak berkaitan dengan perusahaan PMA, Jusuf Anwar mantan Menteri Keuangan RI (2005), menyatakan bahwa 750 perusahaan PMA melaporkan rugi dan tidak pernah membayar pajak berturut-turut selama 5 tahun atau lebih yang antara lain ditengarai karena adanya praktik

penghindaran pajak (Bappenas, 2005). Sebelumnya pada tahun 2002 hal serupa juga terjadi, Theo F. Toemion mengungkapkan bahwa ada sekitar 70% perusahaan PMA yang tidak membayar pajak karena laporan keuangan menunjukkan kerugian (Kompas, 2002). Yang terbaru pada tahun 2012 Dirjen Pajak (2013), mengatakan bahwa ada 4000 perusahaan PMA ditengarai tidak membayar pajak selama 7 tahun. Mereka tidak membayar pajak bukan berarti tidak melaporkan tapi pajaknya nihil yang artinya mereka melaporkan rugi. Dan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan *tax avoidance* yakni dengan membayar pajak rata-rata 20% padahal pajak yang harusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge *et al.*, 2010).

Adanya kasus tersebut jelas merugikan pemerintah karena penerimaan negara dari sektor pajak menjadi berkurang sehingga tindakan tersebut perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Disisi lain untuk pengawasan dari internal, perusahaan bisa menggunakan sarana yang sering disebut dengan sistem pengendalian internal (SPI). Dalam perkembangannya sekarang konsep pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme *corporate governance* yang didasarkan pada teori keagenan dan diharapkan dapat mengawasi aktivitas manajer perusahaan. *Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku serta memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal dan bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal (Permana & Zulaikha, 2015).

Menurut *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* dalam Solihin (2009), *corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Desai & Dharmapala (2004), mendefinisikan penghindaran pajak sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer. Dengan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akhirnya membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik demi keuntungan mereka sendiri dan bukannya demi keuntungan para pemegang saham (Minnick & Noga, 2009). Disinilah peran tata kelola perusahaan (*corporate governance*) diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah agensi tersebut terhadap penghindaran pajak (Armstrong, *et al.*, 2015; Desai & Dharmapala, 2004)

Selain *corporate governance* dalam praktik penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh profitabilitas yang diperoleh perusahaan. *Return on assets (ROA)* merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Darmawan & Sukartha (2014) diperoleh hasil bahwa *ROA* berpengaruh pada penghindaran pajak. Semakin besar *ROA*, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Adanya teori agensi memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) pasti dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Budiman & Setiyono, 2012). Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda (Dewi & Jati, 2014). Seorang pemimpin perusahaan bisa memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi (Dewi & Jati, 2014). Selain itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* akan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat *risk averse* (Hanafi & Harto, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance*. Di Indonesia, penelitian sejenis antara lain dilakukan oleh Permana & Zulaikha (2015), yang menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* pada perusahaan manufaktur periode 2011-2014. Sebelumnya juga ada Dewi & Jati (2014), mengalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2009-2012. Santoso & Muid (2014), yang menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur tahun

2011-2013. Lalu juga ada Puspita & Harto (2014) yang melakukan penelitian untuk menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pada semua perusahaan non-keuangan periode 2010-2012. Kemudian ada Annisa & Kurniasih (2012) menguji pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008. Semua objek penelitian-penelitian sebelumnya merupakan sama-sama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sementara itu, penelitian dari luar Indonesia dilakukan oleh Armstrong *et al.* (2015) yang meneliti tentang hubungan antara tata kelola perusahaan, insentif manajerial, dan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Timothy (2010), yang meninjau hubungan antara *Corporate governance* dan agresivitas pajak pada perusahaan Hong Kong terutama yang dikenakan pajak Hong Kong. Penelitian juga dilakukan oleh Minnick & Noga (2009), menguji bagaimana tata kelola perusahaan yang berperan dalam manajemen pajak jangka panjang. Serta penelitian yang dilakukan oleh Desai & Dharmapala (2004) yang menganalisis hubungan antara penghindaran perusahaan pajak, pertumbuhan insentif bertenaga tinggi untuk manajer, dan struktur tata kelola perusahaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan hasil, Desai & Dharmapala (2004), Minnick & Noga (2009) dan Santoso & Muid (2014) menunjukkan Kompensasi Eksekutif secara signifikan mempengaruhi Penghindaran Pajak, tetapi tidak signifikan menurut Puspita & Harto (2014) dan Permana & Zulaikha (2015). Puspita & Harto (2014) dan Timothy (2010) menunjukkan bahwa secara signifikan Kepemilikan Saham Publik mempengaruhi Penghindaran Pajak tetapi tidak signifikan menurut Annisa & Kurniasih (2012)

dan Santoso & Muid (2014). Kemudian Annisa & Kurniasih (2012) menemukan bahwa Kualitas Audit dan Komite Audit secara signifikan juga mempengaruhi penghindaran pajak, tetapi tidak signifikan menurut Puspita & Harto (2014). Sementara itu Proporsi Dewan Komisaris Independen (Annisa & Kurniasih, 2012; Permana & Zulaikha, 2015; Puspita & Harto, 2014; Santoso & Muid, 2014) dan Jumlah Dewan Komisaris (Annisa & Kurniasih, 2012; Permana & Zulaikha, 2015; Santoso & Muid, 2014) secara konsisten tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak.

Ketidakkonsistenan hasil dan ketidaksignifikan variabel bebas yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada penelitian sebelumnya kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan objek yang diteliti. Adanya hasil yang beragam tersebut sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat kelemahan yaitu sampel penelitian terlalu sedikit dan periode pengamatan rata-rata juga relatif singkat hanya sekitar satu sampai tiga tahun saja. Beberapa peneliti sebelumnya menyarankan untuk menambah variabel-variabel yang baru serta menambah periode pengamatan sehingga dapat diketahui pengaruh penelitian dalam jangka panjang dapat mendapatkan prediksi yang lebih tepat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus variabel, periode penelitian dan sampel penelitian. Penulis akan melakukan penelitian dengan menggabungkan beberapa variabel-variabel independen dari penelitian terdahulu yaitu *Corporate Governance* dan Profitabilitas serta menambahkan variabel Karakter Eksekutif. Dalam penelitian ini variabel

Corporate governance diproksikan oleh tiga hal yaitu Kualitas Audit, Komite Audit dan Kompensasi Eksekutif. Adapun Profitabilitas disini diproksikan menggunakan *Return on Assets (ROA)* dan Karakter Eksekutif diproksikan oleh variabel itu sendiri. Jadi variabel yang akan digunakan adalah *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif. Periode penelitian selama 5 tahun mulai dari tahun 2011 sampai 2015, sedangkan sampel yang digunakan adalah perusahaan dalam sektor *Property, Real Estate* dan *Building Construction*.



1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembuka yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang memberikan dasar dan mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi antara lain definisi penghindaran pajak, *theory agency*, *corporate governance*, profitabilitas dan karakter eksekutif. Selain teori-teori dalam bab ini juga terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Beberapa hal yang dijelaskan di bab ini menyangkut populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel serta metode analisis yang akan digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas perhitungan dalam penelitian, meliputi hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel yang ada dan alat analisis yang diperlukan. Pada bab ini pula akan didapat hasil dari kesimpulan penelitian mengenai terbukti atau tidaknya hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Manfaat landasan teori adalah agar penelitian dapat tepat sasaran dan efektif. Landasan teori dalam penelitian ini adalah Teori Keagenan (*Agency Theory*), Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), *Corporate Governance*, Profitabilitas, Karakter Eksekutif.

2.1.1 *Theory Agency*

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontak yang mana satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk menjalankan aktivitas perusahaan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal disini adalah pemegang saham dimana pemegang saham menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan agen adalah pengelola perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan oleh pemegang saham kepadanya. Prinsipal akan menerima hasil berupa dividen, sedangkan agen memperoleh gaji dan berbagai kompensasi lainnya.

Anthony & Govindarajan (2002) menyebutkan bila melihat teori agensi maka setiap individu akan bertindak untuk kepentingannya sendiri-sendiri, mengikuti sifat dasar manusia. Teori agensi dianggap sesuai dengan penelitian ini karena sebuah perusahaan memiliki sebuah penerapan teori agensi antara pemegang saham dan manajer di dalam perusahaan. Pemegang saham sebagai

prinsipal dianggap hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan, sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori agensi memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Para manajer dalam perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari para pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya.

Permasalahan yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal mengakibatkan munculnya biaya (Meilinda dalam Permana & Zulaikha, 2015). Konflik ini biasanya dikenal dengan *Agency Problem*. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency cost* terdiri atas *monitoring cost* dan *bonding cost*. *Corporate governance* dikatakan dapat menurunkan *monitoring cost* dengan adanya peningkatan pengawasan dan transparansi. Sedangkan *bonding cost* merupakan *agency cost* yang ditanggung oleh direksi yang mencerminkan upaya manajemen dalam menunjukkan kepada *shareholder* bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan (Pohan, 2009). Disinilah letak pentingnya *Corporate governance*.

Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance (GCG)* akan menjembatani kepentingan pemegang saham dan manajer. Seorang manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Hal ini dapat terjadi karena dengan penerapan *GCG* maka perusahaan akan lebih transparan sehingga tidak akan ada masalah kesenjangan informasi. Asas-asas lain dalam *Good*

Corporate Governance akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan juga dapat mengurangi masalah keagenan.

Dengan menerapkan asas transparansi maka pihak eksternal perusahaan dapat mengakses informasi perusahaan, termasuk informasi perpajakan. Keputusan manajer melakukan *Tax Avoidance* dapat terjadi karena manajemen dinilai prestasinya berdasarkan kinerja laba. Keputusan manajemen yang penuh risiko tidak akan dikehendaki oleh pemegang saham karena pemegang saham cenderung berpandangan dalam jangka panjang. Dengan prinsip ini memungkinkan pemegang saham dapat mengetahui keputusan manajemen dengan segera sehingga pemegang saham dapat mengendalikan perilaku manajemen yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam penerapan *GCG* akan membuat manajemen melakukan *tax avoidance* dalam tingkat yang lebih rendah.

Selain asas transparansi, asas akuntabilitas mewajibkan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur sesuai kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Dengan asas ini manajemen perusahaan akan terdorong untuk selalu menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan karena tindakan manajemen akan selalu terawasi dan termonitor. Di sisi lain, asas responsibilitas mengharuskan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Dengan akuntabilitas, keputusan manajemen akan dipertanggungjawabkan,

termasuk keputusan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance* dan dengan asas tanggung jawab manajemen akan mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan perpajakan. Singkatnya dari penerapan asas akuntabilitas dan tanggung jawab juga akan mendorong manajemen perusahaan untuk lebih mematuhi peraturan pajak. Dengan demikian, secara tidak langsung dengan penerapan *good corporate governance* juga akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* karena masalah *tax avoidance* juga merupakan masalah keagenan.

2.1.2 Tax Avoidance

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. Dewi & Jati (2014) menyebutkan bahwa penghindaran pajak yaitu upaya pengurangan beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*).

Rohatgi dalam Rahayu (2010) menyebutkan, penghindaran pajak tidak selalu legal karena pada dasarnya *tax avoidance* di kebanyakan negara dibedakan menjadi dua, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Maksudnya, penghindaran pajak dapat saja ilegal apabila transaksi yang dilakukan

semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*). Transaksi akan disebut sebagai *unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax avoidance* apabila memiliki ciri antara lain tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, dan adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya atau kerugian. Sebaliknya suatu transaksi digolongkan sebagai *acceptable tax avoidance* apabila memenuhi karakteristik antara lain bukan semata-mata untuk menghindari pajak, sesuai dan benar dengan maksud daripada peraturan (perundang-undangan) dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa (Rahayu, 2010).

Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy, 2008). Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991).

Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit untuk dibedakan (Bovi, 2005), sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dari peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang.

2.1.3 Corporate Governance

Corporate governance adalah tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Maharani & Suardana, 2014). Kinerja perusahaan tergantung dari pekerjaan *corporate governance*, keputusan-keputusan dari *corporate governance* mempengaruhi hasil kinerja perusahaan termasuk ketika perusahaan mengalami kerugian ataupun keuntungan. *Corporate governance* memiliki peran penting dalam perusahaan. Perusahaan mengandalkan *corporate governance* sebagai pengawas. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengawasi suatu perusahaan.

Corporate governance timbul sebagai upaya untuk mengatasi perilaku manajemen dari sikap mementingkan diri sendiri, *Corporate Governance* bertujuan untuk menciptakan pengawasan dalam perusahaan yang memastikan adanya optimalisasi atas pemenuhan kepentingan stakeholder serta menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Menurut Michelon (2010) esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja

manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* serta pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Dengan diterapkannya *good corporate governance*, perusahaan akan mendapatkan manfaat, antara lain perbaikan dalam komunikasi, minimalisasi potensi benturan, fokus pada strategi-strategi utama, peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, kesinambungan manfaat (*sustainability of benefits*), promosi citra korporat (*corporate images*), dan perolehan kepercayaan investor.

Prinsip Good Corporate Governance

1. **Transparancy** (Transparansi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. **Accountability** (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. **Responsibility** (Tanggung Jawab)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

4. **Independensi** (Kemandirian)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *GCG*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. **Fairness** (Kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip-prinsip *corporate governance* dari OECD menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Hak-hak para pemegang saham;
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham;
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*;
4. Transparansi dan penjelasan;
5. Peranan dewan komisaris.

Walaupun banyak pendapat tentang definisi dan tujuan *good corporate governance*, namun demikian ada prinsip dasar yang berlaku universal. Sebagai gambaran, untuk berhasil di pasar yang bersaing, suatu perusahaan harus

mempunyai pengelola perusahaan yang inovatif, yang bersedia untuk mengambil risiko yang wajar, dan yang senantiasa mengembangkan strategi baru untuk mengantisipasi situasi yang berubah-ubah (FCGI, 2004).

Dalam penelitian ini *Corporate Governance* diproksikan oleh tiga hal yaitu Kualitas Audit, Komite Audit dan Kompensasi Eksekutif.

2.1.3.1 Kualitas Audit

Salah satu asas penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori: 2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani & Suardana, 2014). Hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain (Deis dalam Suartana: 2007) memaparkan:

- a. Lamanya auditor/umur audit, semakin lama maka semakin rendah kualitas auditnya.
- b. Jumlah klien, semakin banyak maka semakin baik kualitas auditnya.

- c. Kesehatan keuangan klien, makin sehat ada kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku.
- d. Review oleh pihak ketiga, kualitas audit semakin tinggi apabila direview oleh pihak ketiga.

Kualitas Audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut masuk dalam KAP *The Big Four* atau tidak, Watts dan Zimmerman (1986) dalam Kurniasih & Siregar (2007), menyebutkan KAP yang besar lebih independen karena lebih dapat bertahan dari tekanan manajer untuk tidak melaporkan adanya pelanggaran sehingga mengindikasikan bahwa kualitas audit meningkat dengan ukuran KAP.

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Annisa & Kurniasih, 2012). Pernyataan tersebut sejalan dengan Maharani & Suardana (2014) dan Dewi & Jati (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik pengindaran pajak. KAP *The Big Four* adalah *oligopoly industry* akuntansi dan jasa profesional karena mereka menguasai sebagian besar pasar, yaitu perusahaan *go public* di seluruh dunia, dan perusahaan privat besar.

2.1.3.2 Komite Audit

Sejak direkomendasikan *GCG* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik (Daniri dalam Pohan, 2009). Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Sesuai dengan surat edaran yang ada sekurang-kurangnya komite audit dalam perusahaan terdiri atas tiga orang.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut: Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui (Siallagan: 2006) menjelaskan:

- a. Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal
- b. Penggunaan prinsip akuntansi berterima umum
- c. Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan

pengendalian intern kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba yang baik juga bagi perusahaan. Sehingga komite audit bertanggung jawab dalam mengendalikan manajer dalam meningkatkan pertumbuhan laba dimana nantinya manajer cenderung melakukan penekanan-penekanan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak, ini akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan Dewi & Jati (2014) menyebutkan semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan *corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan.

2.1.3.3 Kompensasi Eksekutif

Pada prinsipnya imbalan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu imbalan intrinsik dan ekstrinsik. Imbalan intrinsik yaitu imbalan yang diterima karyawan untuk dirinya sendiri. Imbalan ekstrinsik mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung dan imbalan bukan uang. Bagian yang termasuk dalam kompensasi langsung antara lain adalah gaji pokok, upah lembur, pembayaran insentif, tunjangan, dan bonus. Bagian yang termasuk kompensasi tidak langsung antara lain jaminan sosial, asuransi, pensiun, pesangon, cuti kerja, pelatihan dan liburan. Imbalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompensasi yang mencakup imbalan intrinsik dan ekstrinsik.

Kompensasi merupakan sesuatu yang bersifat finansial ataupun non finansial yang diberikan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan pada periode yang tetap yang diberikan sebagai balas jasa (Sari, 2014). Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada eksekutif menjadi salah satu perhatian

pemegang saham. Perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi kepada eksekutif, namun memberikan pengembalian yang buruk bagi pemegang saham akan memunculkan sebuah konflik.

Salah satu tujuan pemberian kompensasi yaitu untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan produktivitas atau mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Sistem pemberian kompensasi sangat berpengaruh dalam memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Keadilan dalam pemberian kompensasi akan membuat karyawan merasa puas dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya (Muljani, 2002).

Pada penelitian yang dilakukan Desai & Dharmapala (2004) menunjukkan bahwa meningkatkan kompensasi insentif cenderung mengurangi tingkat penyembunyian pajak, dengan cara yang konsisten dengan hubungan yang saling melengkapi antara pengalihan dan penyembunyian pajak. Minnick & Noga, (2009) menyebutkan jika terdapat hubungan antara kompensasi eksekutif dengan penghindaran pajak perusahaan.

2.1.4 Profitabilitas

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai atau menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.

Return on Assets (ROA)

ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. *ROA* dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan *ROA* menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. *ROA* adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. *ROA* yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani & Suardana, 2014).

2.1.5 Karakter Eksekutif

Ada dua jenis karakter yang biasanya dimiliki oleh seorang eksekutif perusahaan, yaitu *risk taker* dan *risk averse* (Low, 2006). Karakter eksekutif *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi (MacCrimmon & Wehrung, 1990). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang, hal ini dilakukan supaya perusahaan tumbuh lebih cepat.

Berbeda dengan *risk averse*, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif berkarakter *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006). Biasanya eksekutif *risk averse* memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan. Dibandingkan dengan *risk taker*, eksekutif *risk averse* lebih menitikberatkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar (MacCrimmon & Wehrung, 1990).

Untuk mengetahui jenis karakter dan menilai seberapa berani eksekutif perusahaan mengambil resiko dapat dilakukan dengan melihat risiko perusahaan (*corporate risk*). *Corporate risk* mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Paligorova (2010) mengukur *corporate risk* menggunakan persamaan standar deviasi dari EBITDA (*earning before income tax, depreciation and amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Tinggi rendahnya *corporate risk* akan menunjukkan kecondongan karakter eksekutif, *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk taker*, sebaliknya semakin rendah risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk averse*.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia maupun di luar Indonesia telah menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang menjadi rujukan pertama peneliti dilakukan oleh Permana & Zulaikha (2015). Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diprosikan oleh variabel Ukuran Dewan Komisaris, Presentase Dewan Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Dalam penelitian ini menggunakan analisis multivariate dengan menggunakan regresi berganda untuk menguji hipotesisnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dewi & Jati (2014). Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2009-2012. Ada tujuh variabel yang diteliti, yaitu Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, *Multinational Company*, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit. Dari penelitian ini hanya ada tiga faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yaitu Risiko Perusahaan, Kualitas Audit dan Komite Audit.

Santoso & Muid (2014), menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur tahun 2011-2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan sedangkan Jumlah dewan komisaris, Proporsi komisaris independen dan Kepemilikan saham oleh publik tidak

berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode ordinary least square (OLS).

Puspita & Harto (2014), melakukan penelitian untuk menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pada semua perusahaan non-keuangan periode 2010-2012. Hasilnya menunjukkan bahwa, Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dan Struktur kepemilikan saham terbesar berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan sedangkan Proporsi komisaris independen, Kompensasi eksekutif dan Struktur kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Analisis datanya menggunakan regresi *ordinary least square* (OLS) dengan memasukkan pengaruh sektor industri dan tahun.

Annisa & Kurniasih (2012) menguji pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008 yang menyelidiki pengaruh tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, persentase komisaris independen, jumlah dewan komisaris, kualitas audit (KAP *big four*), dan jumlah komite audit, terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan BTD. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dan jumlah komite audit terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini tidak membahas lebih lanjut mengenai arah hubungan variabel tersebut dan penyebabnya.

Sementara itu, penelitian dari luar Indonesia dilakukan oleh Armstrong *et al.* (2015) yang meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan (diproksikan dengan jumlah *financial expertise* dalam dewan direksi dan persentase direktur

independen), insentif manajemen, dan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola 38 perusahaan cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak yang ekstrim tinggi dan menaikkan tingkat penghindaran pajak yang ekstrim rendah, dalam distribusi penghindaran pajak perusahaan.

Timothy (2010) meneliti pengaruh hubungan antara *Corporate governance* (diproksikan dengan kepemilikan saham oleh direktur, direktur independen, persentase pemegang saham terbesar, persentase pemegang saham 36 minoritas, dan tarif pajak) dan agresivitas pajak pada perusahaan Hong Kong terutama yang dikenakan pajak Hong Kong. Ditemukan bahwa kepemilikan saham oleh direktur, direktur independen, dan persentase pemegang saham terbesar (sebagai proksi untuk kekuatan pemegang saham) memiliki hubungan yang signifikan dengan agresivitas pajak perusahaan. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa ada hubungan antara tata kelola perusahaan dengan ETR, tetapi hubungan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi.

Penelitian juga dilakukan oleh Minnick & Noga (2009), menguji bagaimana tata kelola perusahaan yang berperan dalam manajemen pajak jangka panjang. Penelitian tersebut berfokus pada komposisi dewan, *entrenchment*, dan kompensasi, menggunakan data yang diambil langsung dari 500 perusahaan S&P tahun 1996-2005. *Effective tax rate* diteliti dengan membagi menjadi komponen-komponen individual, seperti tingkat pajak domestik, pajak luar negeri, dan perubahan dalam penyesuaian nilai. Hasil penelitian ditemukan bahwa sensitivitas *pay-performance* meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan menurunkan pajak jangka panjang. Ditemukan juga bahwa tata kelola memiliki

peran penting dalam manajemen pajak, struktur tata kelola yang berbeda memilih strategi manajemen pajak yang berbeda.

Serta Desai & Dharmapala (2004) yang menganalisis hubungan antara penghindaran perusahaan pajak, pertumbuhan insentif yang kuat untuk manajer, dan struktur tata kelola perusahaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa meningkatkan kompensasi insentif cenderung mengurangi tingkat penyembunyian pajak (*tax sheltering*), dengan cara yang konsisten dengan hubungan yang saling melengkapi antara pengalihan dan penyembunyian. Hasil lainnya adalah efek negatif ini terjadi terutama pada perusahaan yang memiliki susunan tata kelola yang lemah.

Hasil penelitian terdahulu diatas dapat diringkas dan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel Penelitian	Kesimpulan
Permana & Zulaikha (2015)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: 1. Ukuran Dewan Komisaris 2. Presentase Dewan Komisaris Independen 3. Kompensasi Eksekutif Kontrol: 1. <i>Size</i> 2. <i>Leverage</i>	Berdasarkan tiga variabel yang diteliti, diperoleh hasil: 1. Ukuran Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 2. Presentase Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 3. Kompensasi Eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
Dewi & Jati (2014)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen:	Dari penelitian ini hanya ada tiga faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yaitu

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Perusahaan 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Multinational Company</i> 4. Kepemilikan Institusional 5. Proporsi Dewan Komisaris Independen 6. Kualitas Audit 7. Komite Audit 	<p>Risiko Perusahaan, Kualitas Audit dan Komite Audit sedangkan Ukuran Perusahaan, <i>Multinational Company</i>, Kepemilikan Institusional dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan.</p>
Santoso & Muid (2014)	<p>Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dewan Komisaris 2. Presentase Dewan Komisaris Independen 3. Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris & Dewan Direksi 4. Kepemilikan Publik <p>Kontrol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Size</i> 2. ROA 3. <i>Debt to Equity</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. 2. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. 3. Kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. 4. Kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan
Puspita & Harto (2014)	<p>Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit 2. Presentase Komisaris Independen 3. Kompensasi Eksekutif 4. Struktur Kepemilikan Publik 5. Struktur Kepemilikan Terbesar <p>Kontrol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Size</i> 2. ROA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. 2. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. 3. Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. 4. Struktur kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak

		<p>perusahaan.</p> <p>5. Struktur kepemilikan saham terbesar berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.</p>
Annisa & Kurniasih (2012)	<p>Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Independen: Tata Kelola Perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional 2. Persentase komisaris independen 3. Jumlah dewan komisaris 4. Kualitas audit 5. Jumlah komite audit 	<p>Ada hubungan signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP <i>big four</i> dan jumlah komite audit terhadap penghindaran pajak.</p>
Armstrong et al. (2015)	<p>Dependen: Penghindaran pajak</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola perusahaan (jumlah <i>financial expertise</i> dewan direksi dan persentase direktur independen) 2. Insentif manajemen 	<p>Tata kelola perusahaan cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak yang ekstrim tinggi dan menaikkan tingkat penghindaran pajak yang ekstrim rendah, dalam distribusi penghindaran pajak perusahaan.</p>
Timothy (2010)	<p>Dependen: Agresivitas pajak</p> <p>Independen: Tata kelola perusahaan</p>	<p>Kepemilikan saham oleh direktur, direktur independen, dan persentase pemegang saham terbesar (sebagai proksi untuk kekuatan</p>
Minnick & Noga (2009)	<p>Dependen: manajemen pajak</p> <p>Independen: Tata kelola perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah direksi 2. Persentase direktur independen 3. <i>Pay-performance sensitivity</i> CEO dan direktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi eksekutif meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan menurunkan pajak jangka panjang. 2. Tata kelola perusahaan memiliki peran penting dalam manajemen pajak. 3. Struktur tata kelola yang berbeda memilih strategi manajemen pajak yang berbeda.

Desai & Dharmapala (2004)	Dependen: Penghindaran pajak Independen: Insentif manager	Meningkatkan kompensasi insentif cenderung mengurangi tingkat penyembunyian pajak. Efek negatif ini terjadi terutama pada perusahaan yang memiliki susunan tata kelola yang lemah.
---------------------------	--	--

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

2.3.1 Hubungan antara *Corporate Governance* dengan *Tax Avoidance*

Perusahaan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) akan menjembatani kepentingan pemegang saham dan manajer. Manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Hal ini dapat terjadi karena dengan penerapan GCG maka perusahaan akan lebih transparan sehingga masalah kesenjangan informasi bisa teratasi. Asas-asas lain dalam Pedoman Umum *Corporate Governance* Indonesia seperti akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan juga dapat mengurangi masalah keagenan. Dengan demikian, penerapan GCG juga akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* karena masalah *tax avoidance* juga merupakan masalah keagenan. Dalam penelitian ini *Corporate Governance* diproksikan oleh tiga hal yaitu, kualitas audit, komite audit dan kompensasi eksekutif. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Hubungan antara Profitabilitas dengan *Tax avoidance*

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan oleh *Return on Assets* (ROA). Secara logika, semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri

dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Dalam penelitian Maharani & Suardana (2014) menunjukkan bahwa perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Kurniasih & Sari (2013) dalam penelitiannya juga menyebutkan jika ROA mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Hubungan antara Karakter Eksekutif dengan *Tax avoidance*

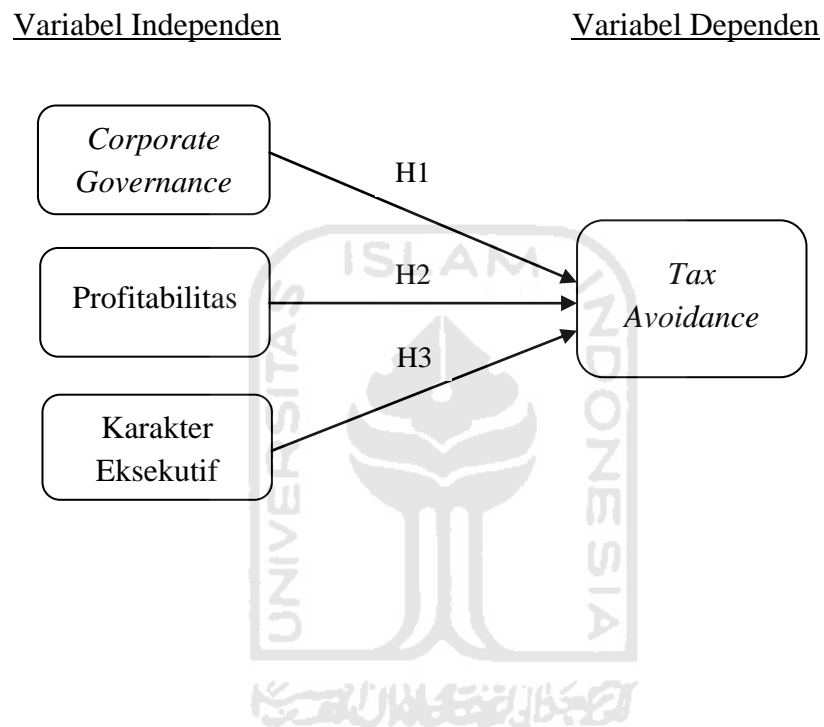
Dalam penelitian yang dilakukan Dyreng *et al.*, (2010) untuk mengetahui apakah individu *top executive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Maharani & Suardana (2014) dan Dewi & Jati (2014) menyebutkan eksekutif yang semakin bersifat *risk taker* kemungkinan akan lebih besar melakukan tindakan *tax avoidance*. Tingkat risiko perusahaan yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4 KERANGKA PENELITIAN

Dari pengembangan hipotesis diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran seperti yang disajikan gambar dibawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property, real estate, dan building construction* yang terdaftar dan menawarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan *property, real estate, dan building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun yaitu tahun 2011-2015 dan tidak mengalami *delisting* selama periode pengamatan.
- 2) Perusahaan memuat dan mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember periode 2011-2015.
- 3) Perusahaan yang memiliki data-data yang diperlukan untuk penelitian.
- 4) Perusahaan menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uangnya.

3.2 SUMBER DAN METODE PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan semua perusahaan *property, real estate, dan building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses dari www.idx.co.id atau dari website masing-masing perusahaan. Data termasuk sebagai data panel karena berasal dari objek yang berbeda-beda dan secara runtun waktu.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Setelah memperoleh daftar perusahaan *property, real estate, dan building construction* selama periode 2011-2015 dari website IDX tahun 2011-2015, kemudian mengakses laporan tahunan dan laporan keuangan tahunannya dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

3.3 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

VARIABEL

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak. Penghindaran Pajak (Y)

merupakan upaya pengurangan beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (Dewi & Jati, 2014). Seperti penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, variabel ini juga diproksikan dengan menggunakan rumus Tarif Pajak Efektif (ETR) yang menggambarkan agresivitas pajak.

Alasan menggunakan ETR sebagai proksi untuk mengukur penghindaran pajak, antara lain penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Armstrong *et al.* (2015); Dyreng *et al.* (2010); Minnick & Noga (2009) dan Permana & Zulaikha (2015) menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak, proksi ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur, dan nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Agresivitas pajak sendiri adalah kegiatan perencanaan dalam usahanya untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak.

Tarif Pajak Efektif dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2011). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

3.3.2.1 Corporate Governance

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dibentuk dengan tujuan membawa perusahaan dalam pengelolaan yang baik, dikatakan baik disini jika pengelolaanya berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* pastinya akan selalu berjalan dibawah hukum, yang kaitannya disini tentang pembayaran pajak.

Corporate Governance diukur dengan tiga proksi (indikator), yaitu Kualitas Audit, Komite Audit dan Kompensasi Eksekutif. Kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu perusahaan yang diaudit oleh *The Big Four* ditandai dengan angka 1 dan yang diaudit oleh non *The Big Four* ditandai dengan angka 0. Komite Audit dalam penelitian ini dilihat dari jumlah komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur.

Kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan total kompensasi diterima eksekutif selama satu tahun. Penelitian ini mengukur kompensasi eksekutif sebagai logaritma total kompensasi, yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima eksekutif (dewan komisaris dan direksi) selama satu tahun. Dalam penelitian ini, total kompensasi bagi dewan komisaris dan direksi dilihat dari catatan atas laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasi perusahaan dimana rumusnya menggunakan Logaritma

total kompensasi setahun yang diterima dewan komisaris dan direksi (Puspita & Harto, 2014).

3.3.2.2 Profitabilitas

Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan oleh *Return on Assets*. *Return on Assets* menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi *ROA*, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. *ROA* dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3.3.2.3 Karakter Eksekutif

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi (Low, 2006). Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang dimiliki perusahaan (Paligorova, 2010) dalam mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui standar deviasi dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan. Rumus deviasi standar tersebut adalah sebagai berikut:

$$RISK = \sum_{T-1}^T \left(E - 1 / T \sum_{T-1}^T E \right)^2 / (T - 1)$$

Dimana E adalah EBITDA dibagi dengan total asset dari perusahaan. Tinggi rendahnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk taker* atau *risk averse*, semakin tinggi risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk taker*, sebaliknya semakin rendah risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk averse*.

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

Di tahap analisis data, data-data yang telah diperoleh selanjutnya diolah secara komprehensif dan bersifat deskriptif-analitik. Analisis keterkaitan antara berbagai variabel dilakukan dengan uji statistik *Structural Equation Modeling* (SEM). Model Persamaan Struktural atau SEM adalah suatu analisis yang menggabungkan pendekatan analisis faktor (*factor analysis*), model struktural (*structural model*) dan analisis jalur (*path analysis*) (Sugiyono, 2011). Analisis SEM pada dasarnya untuk memperoleh suatu model struktural yang kemudian model tersebut dapat digunakan untuk prediksi atau pembuktian model. Selain itu SEM juga dapat digunakan untuk melihat besar kecilnya pengaruh, baik langsung, tak langsung maupun pengaruh total variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan SEM dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). *Partial Least Square* digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu inner model dan *outer model*. *Inner Model* atau Model Struktural menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory* (rumusan masalah atau hipotesis penelitian). *Outer model* atau Model

Pengukuran mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya yang menentukan sifat indikator dari masing-masing variabel laten, apakah refleksif atau formatif, berdasarkan definisi operasional variabel.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kurtosis dan kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Analisis statistik deskriptif merupakan suatu cara pendeskripsian berdasarkan data yang dimiliki, yaitu dengan cara menata data tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan mudah. Metode ini merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan data secara umum. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah diperoleh untuk masing-masing variabel penelitian tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (generalisasi).

3.4.2 Uji Model Pengukuran (*Outer model*)

Model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya atau dapat dikatakan bahwa *outer model* mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Oleh karena itu diasumsikan bahwa antar indikator tidak saling berkorelasi, maka ukuran internal konsistensi reliabilitas (*cronbach alpha*) tidak diperlukan untuk menguji reliabilitas konstruk formatif (Ghozali, 2011). Hal ini berbeda dengan indikator refleksif yang menggunakan tiga kriteria untuk menilai *outer model*, yaitu *convergent validity*, *composite reliability* dan *discriminant validity*. Karena

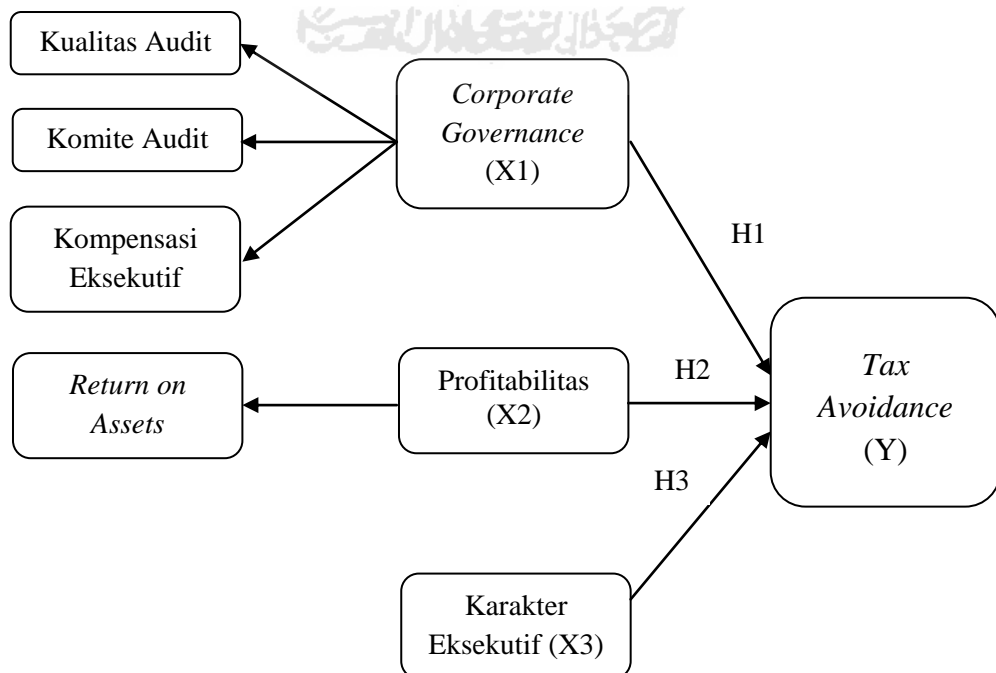
konstruk formatif pada dasarnya merupakan hubungan regresi dari indikator ke konstruk, maka cara menilainya adalah dengan melihat nilai koefisien regresi dan signifikansi dari koefisien regresi tersebut.

3.4.3 Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria *outer model*, berikutnya dilakukan pengujian model structural (*inner model*). Pengujian *inner model* untuk mengevaluasi hubungan konstruk laten atau variabel yang telah dihipotesiskan dalam penelitian ini. Pengujian *inner model* dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk dan nilai signifikansinya serta nilai *R-square*. Nilai *R-square* digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.

3.4.4 Diagram Jalur

Gambar 3.1
Model analisis dari Diagram Jalur



3.4.5 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara T statistik dengan T tabel. Hipotesis diterima apabila nilai T statistik lebih besar dari nilai T tabel. T tabel di tentukan signifikan pada 0,05 (T statistik > dari pada T tabel 1,66).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan PLS dengan model persamaan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 CG + \beta_2 ROA + \beta_3 RISK + e$$

Keterangan :

α	= Konstanta
e	= Standar error
CG	= <i>Corporate Governance</i>
ROA	= <i>Return on Assets</i> (profitabilitas)
RISK	= Karakter Eksekutif
ETR	= Penghindaran Pajak

3.5 HIPOTESA OPERASIONAL

3.5.1 Corporate Governance

H1 : Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

Ho1; $\beta_1 \geq 0$: Corporate Governance tidak berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

Ha1; $\beta_1 < 0$: Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

3.5.2 Profitabilitas

H2 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

Ho2; $\beta_2 \geq 0$: Profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

Ha2; $\beta_2 < 0$: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

3.5.3 Karakter Eksekutif

H3 : Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Ho3; $\beta_3 \leq 0$: Karakter Eksekutif tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Ha3; $\beta_3 > 0$: Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*



BAB IV
DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan *Property, Real Estate, dan Building Construction* yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015. Pengambilan sampelnya dengan cara *purposive sampling* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab tiga. Sampel penelitian yang terpilih sebanyak 25 perusahaan. Sampel yang telah dipilih selanjutnya digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Distribusi sampel dapat dilihat pengambilan sampel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan <i>property, real estate, dan building construction</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun yaitu tahun 2011-2015	49
2	Perusahaan yang tidak memuat dan mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember periode 2011-2015	(9)
3	Perusahaan <i>property, real estate, dan building construction</i> yang tidak memiliki kelengkapan data penelitian	(15)
4	Perusahaan <i>property, real estate, dan building construction</i> yang tidak menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uangnya	(0)
	Jumlah Sampel Perusahaan	25

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif ini menggambarkan tentang data masing-masing variabel secara umum atas data yang diolah, antara lain: mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Hasil dari statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	125	0,0001	0,7522	0,141500	0,1215178
KUA	125	0,00	1,00	0,3200	0,46835
KA	125	2,00	4,00	3,0400	0,26640
LKOM	125	8,719	11,072	10,10379	0,460160
ROA	125	0,004	0,316	0,07178	0,052947
RISK	125	0,01	0,13	0,0343	0,03002
Valid N (listwise)	125				

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016

Keterangan :

ETR = Penghindaran Pajak

KUA = Kualitas Audit

KA = Komite Audit

LKOM = Kompensasi Eksekutif

ROA = *Return on Assets*

RISK = Karakter Eksekutif

Dari hasil analisis statistik deskriptif diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai minimum penghindaran pajak adalah sebesar 0,0001 yang diperoleh PT Roda Vivatex Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai penghindaran pajak paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,0001. Sedangkan nilai maksimum penghindaran pajak adalah sebesar 0,7522 yang diperoleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai penghindaran pajak paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,7522. Nilai rata-rata penghindaran pajak tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,14155 dengan standar deviasi sebesar 0,1215. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan adalah sebesar 0,14155 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,1215178 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel penghindaran pajak adalah sebesar 0,1215178. Nilai standar deviasi sebesar 0,1215178 lebih kecil dari nilai rata-ratanya sehingga dapat disimpulkan bahwa data penghindaran pajak bersifat homogen.
2. Nilai minimum kualitas audit adalah sebesar 0. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan menggunakan KAP *Non Big Four*. Sedangkan nilai maksimum kualitas audit adalah sebesar 1, hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan menggunakan KAP *The Big Four*. Nilai rata-rata kualitas audit tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,32 dengan standar deviasi sebesar 0,46835. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa jumlah perusahaan yang menggunakan KAP *The Big Four* adalah sebesar 0,32 sedangkan

nilai standar deviasi sebesar 0,46835 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel kualitas audit adalah sebesar 0,46835. Nilai standar deviasi sebesar 0,46835 lebih besar dari nilai rata-ratanya sehingga dapat disimpulkan bahwa data kualitas audit bersifat heterogen.

3. Nilai minimum komite audit adalah sebesar 2 yang diperoleh PT Perdana Gapuraprima Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai komite audit paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 2. Sedangkan nilai maksimum komite audit adalah sebesar 4 yang diperoleh PT Sentul City Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai ukuran komite audit paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 4. Nilai rata-rata komite audit tahun 2011-2015 adalah sebesar 3,04 dengan standar deviasi sebesar 0,2664. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat jumlah anggota komite audit dalam perusahaan sampel adalah sebanyak 3 orang sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,2664 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel komite audit adalah sebesar 0,2664. Nilai standar deviasi sebesar 0,2664 lebih kecil dari nilai rata-ratanya sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit pajak bersifat homogen.
4. Nilai minimum kompensasi eksekutif adalah sebesar 8,719 yang diperoleh PT Pikko Land Development Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kompensasi paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 8,719. Sedangkan nilai maksimum kompensasi eksekutif adalah sebesar 11,072 yang diperoleh PT Ciputra Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai kompensasi paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar

11,072. Nilai rata-rata kompensasi tahun 2011-2015 adalah sebesar 10,10379 dengan standar deviasi sebesar 0,460160. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kompensasi perusahaan adalah sebesar 10,10379 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,460160 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel kompensasi adalah sebesar 0,460160. Nilai standar deviasi sebesar 0,460160 lebih kecil dari nilai rata-ratanya sehingga dapat disimpulkan bahwa data kompensasi eksekutif bersifat homogen.

5. Nilai minimum profitabilitas adalah sebesar 0,004 yang diperoleh PT Sentul City Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai profitabilitas paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,004. Sedangkan nilai maksimum profitabilitas adalah sebesar 0,316 yang diperoleh PT Danayasa Arthatama Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai profitabilitas paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,316. Nilai rata-rata profitabilitas tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,07178 dengan standar deviasi sebesar 0,052947. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba adalah sebesar 0,07178 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,052947 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel profitabilitas adalah sebesar 0,052947. Nilai standar deviasi sebesar 0,052947 lebih kecil dari nilai rata-ratanya sehingga dapat disimpulkan bahwa data profitabilitas bersifat homogen.

6. Nilai minimum karakter eksekutif adalah sebesar 0,01 yang diperoleh PT Suryamas Dutamakmur Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai karakter

eksekutif paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,01. Sedangkan nilai maksimum karakter eksekutif adalah sebesar 0,13 yang diperoleh PT Danayasa Arthatama Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai karakter eksekutif paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,13. Nilai rata-rata karakter eksekutif tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,0343 dengan standar deviasi sebesar 0,03002. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat karakter eksekutif perusahaan adalah sebesar 0,0343 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,03002 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel karakter eksekutif adalah sebesar 0,03002. Nilai standar deviasi sebesar 0,03002 lebih kecil dari nilai rata-ratanya sehingga dapat disimpulkan bahwa data karakter eksekutif bersifat homogen.

4.3 Uji Outer Model

Uji *outer model* mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Oleh karena itu diasumsikan bahwa antar indikator tidak saling berkorelasi, maka ukuran internal konsistensi reliabilitas (*cronbach alpha*) tidak diperlukan untuk menguji reliabilitas konstruk formatif (Ghozali, 2011). Hal ini berbeda dengan indikator refleksif yang menggunakan tiga kriteria untuk menilai *outer model*, yaitu *convergent validity*, *composite reliability* dan *discriminant validity*. Karena konstruk formatif pada dasarnya merupakan hubungan regresi dari indikator ke konstruk, maka cara menilainya adalah dengan melihat nilai koefisien regresi dan signifikansi dari koefisien regresi tersebut. Berikut ini adalah hasil uji *outer model*.

Tabel 4.3
Hasil Uji *Outer model*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
KUA <- GCG	0,832536	0,664658	0,298404	0,298404	2,789961
KA <- GCG	-0,374904	-0,413598	0,249747	0,249747	1,501137
LKOM <- GCG	-0,123227	-0,446873	0,281552	0,281552	0,437671

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016

Dari hasil pengujian *outer model* tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit dan kompensasi eksekutif tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% karena nilai T statistik <1,66 sedangkan variabel kualitas audit signifikan pada signifikansi 5% karena nilai T statistik > 1,66. Karena terdapat indikator yang tidak signifikan, maka perlu dilakukan pengujian ulang dengan mengeliminasi indikator-indikator yang tidak signifikan dan atau hanya melibatkan indikator-indikator yang mendekati signifikan. Sehingga dalam analisis selanjutnya pengukuran *corporate governance* hanya dirpoksikan menggunakan variabel kualitas audit.

4.4 Uji *Inner Model*

Pengujian *inner model* adalah untuk mengevaluasi hubungan konstruk laten atau variabel yang telah dihipotesiskan dalam penelitian ini. Pengujian *inner model* dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk dan nilai signifikansinya serta nilai *R-square*. Nilai *R-square* digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Berikut ini adalah perhitungan *inner model* dari data

yang didapatkan dan digunakan oleh peneliti dengan menggunakan *Partial Least Square*.

Tabel 4.4
Hasil Uji Inner Model

	<i>R Square</i>
ETR	0,236237

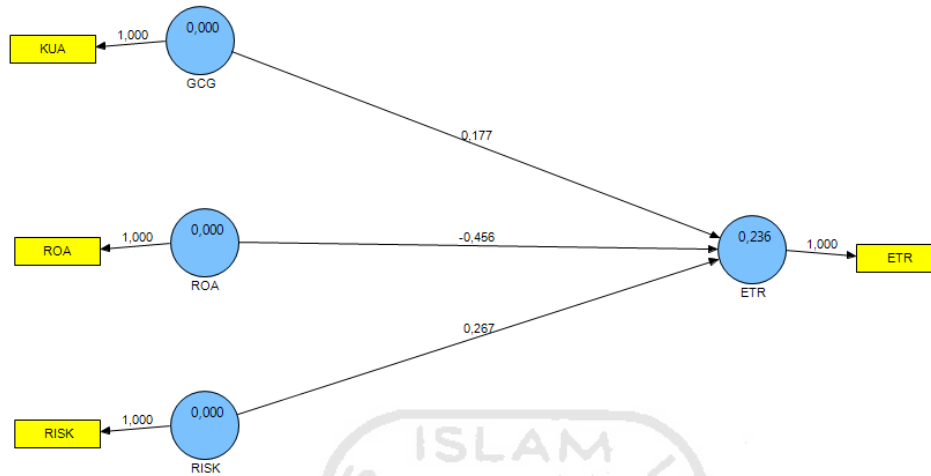
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2016

Model memberikan nilai *R-square* sebesar 0,236237 yang berarti bahwa variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel *Corporate Governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif sebesar 23,6237%. Sedangkan sisanya 76,3763% dipengaruhi variabel lain.

4.5 Uji Hipotesis

Dari pengolahan data, pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikansinya dan parameter *path* antara variabel laten. Hipotesis yang diajukan untuk mengetahui hubungan masing-masing konstruk yang dihipotesiskan. Gambar 4.1 menunjukkan hubungan yang bervariasi. Hubungan positif terjadi pada semua hubungan antar konstruk dengan nilai korelasi yang bervariasi.

Gambar 4.1
Hubungan Antar Konstruk



Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016

Pengambilan keputusan didasarkan pada arah hubungan dan signifikansi dari model pengujian dan korelasi antar konstruk yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 merupakan output hasil dari *inner weight* dengan bantuan *software* SmartPLS. Hasil dari *inner weight* ini menunjukkan hubungan korelasi antar konstruk yang menghubungkan antar variabel yang membentuk sebuah hipotesis.

Tabel 4.5
Signifikansi Hubungan Antar Variabel

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>Standard Error (STERR)</i>	<i>T Statistics (O/STERR)</i>	Ket
GCG -> ETR	0,177075	0,173514	0,085054	0,085054	2,081910	Ho1 didukung data
ROA -> ETR	-0,455692	-0,453194	0,060163	0,060163	7,574324	Ho2 tidak didukung data
RISK -> ETR	0,267066	0,253291	0,089306	0,089306	2,990476	Ho3 tidak didukung data

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016

Hasilnya pengujian hipotesis dengan PLS dapat diinterpretasikan dengan melakukan uji statistik dengan membandingkan antara T hitung (T statistik) dengan T tabel. Nilai pada T tabel didapat dengan rumus (N-K), dimana:

N = Jumlah Data

K = Jumlah Variabel

Dapat Disimpulkan bahwa nilai T tabel adalah 1,66 yang didapat dari pengurangan 125 (jumlah data) – 4 (jumlah variabel) yang menghasilkan poin 121. Sehingga untuk penelitian satu arah dengan alpha 5%, untuk baris 121 ditemukan nilai 1,66. Jika nilai T statistik lebih tinggi daripada nilai T tabel, hal tersebut dapat membuktikan adanya pengaruh antar variabel yang diuji.

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah *Corporate Governance* (CG) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari tabel diatas parameter hubungan *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 0,177705 dan nilai T statistik sebesar 2,08191. Pada tingkat

signifikansi 5% hubungan antara *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak signifikan karena nilai T statistik $>$ t-tabel ($2,08191 > 1,66$), sehingga dapat diartikan *Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini tidak didukung.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari tabel diatas parameter hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak adalah sebesar $-0,455692$ dan nilai T statistik sebesar $7,574324$. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan antara profitabilitas terhadap perhindaran pajak signifikan karena nilai T statistik $>$ T tabel ($7,574324 > 1,66$), sehingga dapat diartikan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kedua penelitian ini didukung.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari tabel diatas parameter hubungan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak adalah sebesar $0,267066$ dan nilai T statistik sebesar $2,990476$. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan antara profitabilitas terhadap perhindaran pajak signifikan karena nilai T statistik $>$ T tabel ($2,990476 > 1,66$), sehingga dapat diartikan Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis ketiga penelitian ini didukung.

4.6 PEMBAHASAN

4.6.1 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *corporate governance* tidak mengurangi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Meski perusahaan di Indonesia sudah menerapkan kebijakan GCG, nilai yang tinggi dalam GCG tidak menjamin bahwa pelaksanaan GCG akan mengurangi tindakan manajemen dalam penghindaran pajak. Kemungkinan hal ini salah satunya disebabkan karena respon pengguna terhadap implementasi GCG tidak bisa dinilai secara jangka pendek tetapi harus dengan jangka panjang, sehingga pengaruh GCG tidak dapat diukur kesuksesannya jika hanya mengandalkan beberapa periode akuntansi saja. Selain itu karena *corporate governance* disini hanya diwakili oleh Kualitas Audit, kemungkinan lainnya disebabkan karena meskipun perusahaan menggunakan jasa KAP *The Big Four* dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, namun hal itu tidak akan menghalangi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena fungsi auditor hanya untuk menguji kewajaran informasi laporan keuangan suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Annisa & Kurniasih (2012) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan Desai & Dharmapala (2004) membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh secara negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.6.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar profitabilitas akan mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan oleh *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Dalam penelitian Maharani & Suardana (2014) menunjukkan bahwa perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Seperti yang kita tahu pembagian dividen kepada pemegang saham dan pemberian bonus kepada manajer berdasar pada laba yang diperoleh perusahaan. Ketika manajer merasa laba yang didapat sudah cukup maka kemungkinan besar manajer tidak akan melakukan skema penghindaran pajak, namun jika mereka merasa laba yang didapat belum cukup pasti mereka akan berupaya untuk memaksimalkan laba dengan cara mengurangi beban-beban yang dikeluarkan yang kaitannya disini adalah mengurangi jumlah pajak terutangnya yaitu dengan melakukan skema penghindaran pajak.

Hasil ini sesuai penelitian Kurniasih & Sari (2013) dalam penelitiannya juga menyebutkan jika ROA mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

4.6.3 Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar karakter eksekutif akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

Dalam penelitian yang dilakukan Dyreng *et al.* (2010) untuk mengetahui apakah individu *top executive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Maharani & Suardana (2014) dan Dewi & Jati (2014) menyebutkan eksekutif yang semakin bersifat *risk taker* kemungkinan akan lebih besar melakukan tindakan *tax avoidance*. Tingkat risiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang berarti lebih berani mengambil risiko. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Desai & Dharmapala (2004), Minnick & Noga (2009) dan Santoso & Muid (2014) menunjukkan Karakter Eksekutif secara signifikan mempengaruhi Penghindaran Pajak.

Tabel 4.6

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis		Kesimpulan
Ho1 :	<i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	Ho1 didukung oleh data, maka
Ha1 :	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	Ha1 ditolak
Ho2 :	Profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	Ho2 tidak didukung oleh data, maka
Ha2 :	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	Ha2 diterima
Ho3 :	Karakter Eksekutif tidak berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Ho3 tidak didukung oleh data, maka
Ha3 :	Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Ha3 diterima

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *corporate governance* tidak mengurangi tindakan penghindaran pajak perusahaan.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar profitabilitas akan mengurangi tindakan penghindaran pajak.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar karakter eksekutif akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian yang ingin dicapai, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan *property, real estate dan building construction* sebagai obyek penelitian sehingga tidak bisa membedakan spesifikasi jenis industri, yang secara struktur akuntansi antara industri satu dengan lainnya berbeda, sehingga dapat mempengaruhi

hasil penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini juga relatif kecil karena terbatasnya periode waktu pengamatan yaitu hanya 5 tahun.

2. Pengukuran masing-masing variabel independen dan dependen masih terbatas pada satu sampai tiga pengukuran.
3. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,236237 pada variabel kinerja perusahaan yang berarti bahwa variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif sebesar 23,6237%. Sedangkan sisanya 76,3763% dipengaruhi variabel lain.

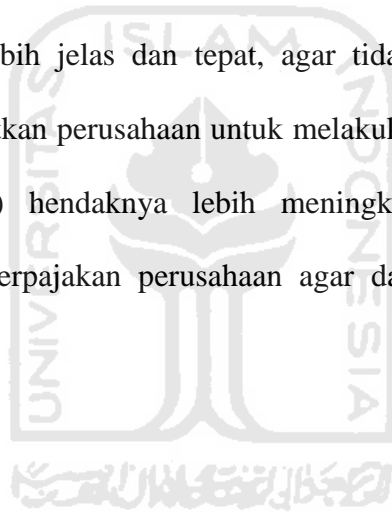
5.3 SARAN

Dari keterbatasan yang telah disebutkan, ada beberapa saran pada penelitian selanjutnya:

1. Penelitian mendatang diharapkan menggunakan jenis industri yang lain sehingga dapat membedakan peranan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan dari beberapa jenis industri yang berbeda. Penelitian mendatang diharapkan agar menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga hasil kesimpulan ini dapat digeneralisasikan untuk periode yang lebih panjang.
2. Pengukuran masing-masing variabel bisa ditambah seperti GCG menggunakan ukuran dewan komisaris, komisaris independen atau struktur kepemilikan, profitabilitas menggunakan ROE, NPM, atau ROI.
3. Untuk penelitian mendatang diharapkan agar menambah variabel independen lain seperti ukuran perusahaan, *leverage* atau likuiditas.

5.4 IMPLIKASI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tidak hanya bagi perusahaan *Property, Real Estate* dan *Building Construction* tetapi kepada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. Untuk para investor diharapkan lebih memperhatikan tingkat kepatuhan pembayaran pajak perusahaan tujuan investasinya, ketika investor juga memperhatikan tingkat kepatuhan pembayaran pajaknya maka kemudian kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak lebih kecil sebagai salah satu alasan dalam menarik investor. Kemudian untuk pemerintah diharapkan dalam pembuatan undang-undang tentang perpajakan ini lebih jelas dan tepat, agar tidak ada celah-celah yang kemudian dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan kecurangan, dan bagi pemungut pajak (fiskus) hendaknya lebih meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan agar dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.



DAFTAR REFERENSI

- 4000 Perusahaan, Tak Bayar Pajak selama 7 tahun. (2012). Retrieved from http://www.kompasiana.com/zen-muttaqin/4000-perusahaan-tak-bayar-pajak-selama-7-tahun_552c16f76ea834744a8b459a
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8 No. 2, 95–189.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2002). *Sistem Pengendalian Manajemen Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance, 0–42. <http://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Bovi, M. (2005). Book-Tax Gap . An Income Horse Race by, (December).
- Budiman, J., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 143–161.
- Desai, M. a., & Dharmapala, D. (2004). Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 42. <http://doi.org/10.2139/ssrn.532702>
- Dewi, N. ., & Jati, I. . (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(2), 249–260.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <http://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting ISSN (Online) : 2337:3806*, 3(2), 1–11.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kurniasih, L., & Siregar, S. V. (2007). Pengaruh Langsung dan Moderasi

Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Saham Pasca IPO. In Seminar Nasional Ketahanan Ekonomi. FE UPN “Veteran” Yogyakarta.

- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governanc , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Low, A. (2006). “Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation”. Fisher College of Business Working Paper, 03-003. Mills, L dan K. Newberry. 2001. The Influence of Tax and Nontax Costs on Book-Tax Reporting Differences. *The Journal of the American Taxation Association*, 23(1), 1–19.
- MacCrimmon, K. R., & Wehrung, D. A. (1990). Characteristics of Risk Taking Executives. *Management Science*, 36(4), 422–435.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2 ISSN 2302-8556*, 2, 525–539.
- Minnick, K., & Noga, T. (2009). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management ?, (September).
- Muljani, N. (2002). Kompensasi Sebagai Motivator Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Jurusan Ekonomi Manajemen*, 4(2), 108–122. Retrieved from <http://puslit.petra.ac.id/journals/management/>
- Paligorova, T. (2010). *Corporate Risk Taking and Ownership Structure*. Ottawa.
- Permana, A. R. D., & Zulaikha. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014), 4, 1–11.
- Pohan, H. T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK*, 4(2), 113–135.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting ISSN (Online) : 2337:3806*, 3 nomor 2, 1–13.
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61–78.
- Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2007-2016. (2016). Retrieved April 16, 2016, from <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap

Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting ISSN (Online) : 2337:3806*, 3, 1–12.

Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI, 2, 525–539.

Sari, S. (2014). *Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Disparatis Gaji Karyawan, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Operasional, Resiko Kredit, Dan Resiko Pasar Perbankan Indonesia*.

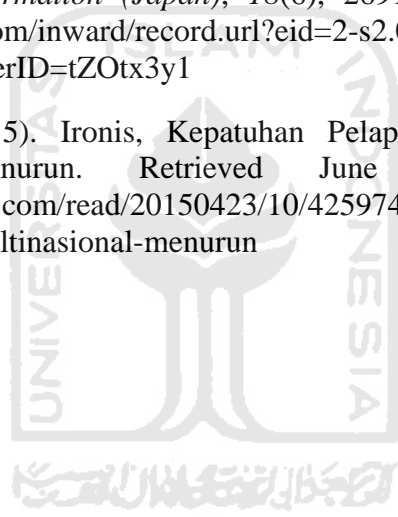
Solihin, I. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2011). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Timothy, Y. C. K. (2010). Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness. *Information (Japan)*, 18(6), 2691–2697. Retrieved from <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84942878415&partnerID=tZOtx3y1>

Wicaksono, K. A. (2015). Ironis, Kepatuhan Pelaporan Pajak Perusahaan Multinasional Menurun. Retrieved June 14, 2016, from <http://finansial.bisnis.com/read/20150423/10/425974/p-kepatuhan-pelaporan-pajak-perusahaan-multinasional-menurun>



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Sampel Perusahaan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	APLN	Agung Podomoro Land Tbk
2	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk
3	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk
4	BKSL	Sentul City Tbk
5	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
6	CTRA	Ciputra Development Tbk
7	CTRP	Ciputra Property Tbk
8	CTRS	Ciputra Surya Tbk
9	DART	Duta Anggada Realty Tbk
10	DILD	Intiland Development Tbk
11	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
12	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk
13	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk
14	LAMI	Lamicitra Nusantara Tbk
15	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
16	MDLN	Modernland Realty Ltd Tbk
17	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk
18	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk
19	PUDP	Pudjiati Prestige Tbk
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk
21	RDTX	Roda Vivatex Tbk
22	RODA	Pikko Land Development Tbk
23	SCBD	Danayasa Arthatama Tbk
24	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk
25	SMRA	Summarecon Agung Tbk

LAMPIRAN 2

Data Variabel Penghindaran Pajak

No	Kode Perusahaan	Beban Pajak (A)	Laba Sebelum Pajak (B)	ETR (A) / (B)
		2011	2011	2011
1	APLN	203.321.472.000	888.230.223.000	0,229
2	ASRI	68.406.592.318	671.143.201.775	0,102
3	BAPA	1.691.987.004	7.593.239.089	0,223
4	BKSL	20.403.602.336	156.853.638.596	0,130
5	BSDE	158.196.682.792	1.170.230.504.942	0,135
6	CTRA	124.766.421.467	618.777.509.297	0,202
7	CTRP	35.367.042.642	203.925.822.496	0,173
8	CTRS	40.216.734.356	239.543.797.962	0,168
9	DART	35.761.925.000	99.574.247.000	0,359
10	DILD	75.804.487.283	198.562.902.312	0,382
11	DUTI	66.956.991.565	489.362.394.057	0,137
12	GPRA	11.542.004.782	56.396.669.515	0,205
13	KIJA	37.137.354.461	363.268.521.380	0,102
14	LAMI	1.669.491.000	9.673.395.000	0,173
15	LPCK	43.898.996.516	301.579.747.646	0,146
16	MDLN	24.097.695.017	98.215.038.211	0,245
17	MKPI	77.273.232.590	400.275.383.809	0,193
18	PLIN	47.624.670.000	130.752.933.000	0,364
19	PUDP	3.674.166.940	24.694.962.775	0,149
20	PWON	91.339.101.000	469.870.548.000	0,194
21	RDTX	19.526.583.545	133.487.034.959	0,146
22	RODA	10.309.227.929	22.811.680.359	0,452
23	SCBD	54.795.642.000	127.555.403.000	0,430
24	SMDM	8.721.778.000	33.559.169.000	0,260
25	SMRA	142.209.087.000	530.915.731.000	0,268

Data Variabel Penghindaran Pajak

No	Kode Perusahaan	Beban Pajak (A)	Laba Sebelum Pajak (B)	ETR (A) / (B)
		2012	2012	2012
1	APLN	256.255.978.000	1.097.546.731.000	0,233
2	ASRI	128.103.048.000	1.344.194.587.000	0,095
3	BAPA	1.001.862.264	5.489.991.039	0,182
4	BKSL	27.419.286.056	248.345.307.082	0,110
5	BSDE	217.705.039.997	1.696.563.824.942	0,128
6	CTRA	180.027.980.317	1.029.410.856.133	0,175
7	CTRP	56.891.888.501	376.043.656.054	0,151
8	CTRS	55.293.395.974	329.206.951.938	0,168
9	DART	59.206.578.000	240.034.830.000	0,247
10	DILD	75.804.487.283	276.240.213.661	0,274
11	DUTI	91.360.686.637	704.688.528.748	0,130
12	GPRA	21.453.041.425	77.734.544.649	0,276
13	KIJA	77.768.928.132	457.791.362.222	0,170
14	LAMI	8.258.094.000	47.512.052.000	0,174
15	LPCK	50.583.453.848	457.605.362.145	0,111
16	MDLN	51.132.218.571	311.607.099.170	0,164
17	MKPI	85.304.962.908	448.355.218.609	0,190
18	PLIN	101.510.850.000	336.236.014.000	0,302
19	PUDP	3.113.866.915	24.251.842.918	0,128
20	PWON	134.608.929.000	901.104.834.000	0,149
21	RDTX	23.331.303.887	148.149.282.251	0,157
22	RODA	11.364.202.407	82.164.142.981	0,138
23	SCBD	41.653.832.000	111.120.330.000	0,375
24	SMDM	11.243.078.000	57.562.764.000	0,195
25	SMRA	194.308.738.000	986.394.703.000	0,197

Data Variabel Penghindaran Pajak

No	Kode Perusahaan	Beban Pajak (A)	Laba Sebelum Pajak (B)	ETR (A) / (B)
		2013	2013	2013
1	APLN	246.935.022.000	1.177.175.519.000	0,210
2	ASRI	192.199.233.000	1.081.775.829.000	0,178
3	BAPA	1.769.234.088	6.794.971.239	0,260
4	BKSL	35.034.035.224	640.129.649.223	0,055
5	BSDE	373.305.894.466	3.278.954.399.964	0,114
6	CTRA	296.103.334.862	1.709.491.785.185	0,173
7	CTRP	91.669.390.962	533.793.531.842	0,172
8	CTRS	75.374.116.825	488.183.183.290	0,154
9	DART	60.651.706.000	241.451.997.000	0,251
10	DILD	74.140.672.440	403.749.214.301	0,184
11	DUTI	97.309.514.256	854.167.951.046	0,114
12	GPRA	24.005.730.756	130.517.196.097	0,184
13	KIJA	99.687.572.897	204.165.205.511	0,488
14	LAMI	7.915.412.000	62.255.431.000	0,127
15	LPCK	75.065.688.080	665.682.618.221	0,113
16	MDLN	96.911.187.293	2.548.597.657.571	0,038
17	MKPI	98.921.197.830	464.484.275.888	0,213
18	PLIN	101.202.729.000	134.545.645.000	0,752
19	PUDP	2.981.152.001	29.360.040.592	0,102
20	PWON	194.644.175.000	1.331.191.716.000	0,146
21	RDTX	33.484.343.327	231.714.185.291	0,145
22	RODA	30.369.594.595	407.176.399.484	0,075
23	SCBD	149.048.213.000	1.903.572.424.000	0,078
24	SMDM	15.882.120.000	42.353.329.000	0,375
25	SMRA	223.537.093.000	1.319.425.341.000	0,169

Data Variabel Penghindaran Pajak

No	Kode Perusahaan	Beban Pajak (A)	Laba Sebelum Pajak (B)	ETR (A) / (B)
		2014	2014	2014
1	APLN	42.580.102.000	938.383.823.000	0,045
2	ASRI	71.834.954.000	1.248.790.077.000	0,058
3	BAPA	68.449.227	7.114.955.023	0,010
4	BKSL	1.347.685.214	39.131.685.797	0,034
5	BSDE	3.307.830.000	3.997.294.801.902	0,001
6	CTRA	48.756.419.526	1.843.149.053.129	0,026
7	CTRP	10.678.994.867	409.714.066.133	0,026
8	CTRS	2.628.334.761	587.027.142.225	0,004
9	DART	87.009.186.000	495.034.985.000	0,176
10	DILD	3.476.798.960	436.255.218.284	0,008
11	DUTI	1.070.574.000	700.022.763.429	0,002
12	GPRA	1.091.758.239	93.319.782.990	0,012
13	KIJA	99.615.936.594	498.442.557.901	0,200
14	LAMI	865.093.000	39.251.761.000	0,022
15	LPCK	15.054.362.339	861.026.179.916	0,017
16	MDLN	7.915.207.003	714.210.615.235	0,011
17	MKPI	91.330.909	437.955.192.730	0,000
18	PLIN	11.238.014.000	370.233.469.000	0,030
19	PUDP	1.665.566.066	16.478.685.771	0,101
20	PWON	10.401.264.000	2.609.233.281.000	0,004
21	RDTX	20.618.018	223.052.775.806	0,000
22	RODA	8.884.373.209	508.551.204.255	0,017
23	SCBD	39.081.762.000	170.846.140.000	0,229
24	SMDM	285.099.000	44.324.648.000	0,006
25	SMRA	318.134.462.000	1.936.308.379.000	0,164

Data Variabel Penghindaran Pajak

No	Kode Perusahaan	Beban Pajak (A)	Laba Sebelum Pajak (B)	ETR (A) / (B)
		2015	2015	2015
1	APLN	22.157.498.000	1.138.920.945.000	0,019
2	ASRI	74.669.541.000	758.957.294.000	0,098
3	BAPA	127.141.463	1.331.784.437	0,095
4	BKSL	372.555.491	62.046.220.824	0,006
5	BSDE	10.701.865.488	2.362.081.922.633	0,005
6	CTRA	145.803.279.204	1.885.084.170.375	0,077
7	CTRP	15.079.747.419	364.801.388.315	0,041
8	CTRS	3.078.421.861	663.190.636.778	0,005
9	DART	62.410.995.000	240.176.803.000	0,260
10	DILD	157.189.266	419.201.384.730	0,000
11	DUTI	930.336.534	671.879.833.281	0,001
12	GPRA	937.789.243	73.831.113.410	0,013
13	KIJA	13.614.492.322	345.057.155.483	0,039
14	LAMI	583.723.000	154.122.174.000	0,004
15	LPCK	15.528.253.551	930.517.532.765	0,017
16	MDLN	86.689.004.265	960.109.200.223	0,090
17	MKPI	630.960.319	890.259.826.051	0,001
18	PLIN	7.367.780.000	272.322.139.000	0,027
19	PUDP	3.765.400.126	31.357.352.486	0,120
20	PWON	24.587.893.000	1.425.142.011.000	0,017
21	RDTX	228.272.047	256.034.229.303	0,001
22	RODA	12.495.410.722	467.146.662.558	0,027
23	SCBD	42.760.348.000	202.116.666.000	0,212
24	SMDM	1.568.663.000	76.808.458.000	0,020
25	SMRA	316.174.047.000	1.382.182.920.000	0,229

LAMPIRAN 3

Data Variabel Kualitas Audit

No	Kode Perusahaan	Kualias Audit				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	APLN	1	1	1	1	1
2	ASRI	0	0	0	0	0
3	BAPA	0	0	0	0	0
4	BKSL	0	0	0	0	0
5	BSDE	0	0	0	0	0
6	CTRA	1	1	1	1	1
7	CTRP	1	1	1	1	1
8	CTRS	1	1	1	1	1
9	DART	1	1	1	1	1
10	DILD	0	0	0	0	0
11	DUTI	0	0	0	0	0
12	GPRA	0	0	0	0	0
13	KIJA	0	0	0	0	0
14	LAMI	0	0	0	0	0
15	LPCK	0	0	0	0	0
16	MDLN	0	0	0	0	0
17	MKPI	0	0	0	0	0
18	PLIN	1	1	1	1	1
19	PUDP	0	0	0	0	0
20	PWON	1	1	1	1	1
21	RDTX	0	0	0	0	0
22	RODA	0	0	0	0	0
23	SCBD	0	0	0	0	0
24	SMDM	0	0	0	0	0
25	SMRA	1	1	1	1	1

LAMPIRAN 4

Data Variabel Komite Audit

No	Kode Perusahaan	Komite Audit				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	APLN	3	3	3	3	3
2	ASRI	3	3	3	3	3
3	BAPA	3	3	3	3	3
4	BKSL	3	3	3	4	4
5	BSDE	3	3	3	3	3
6	CTRA	3	3	3	3	3
7	CTRP	3	3	3	3	3
8	CTRS	3	3	3	3	3
9	DART	3	3	3	3	3
10	DILD	3	3	3	3	3
11	DUTI	3	3	3	3	3
12	GPRA	3	3	3	2	3
13	KIJA	3	3	3	3	3
14	LAMI	3	3	3	3	3
15	LPCK	3	3	3	3	3
16	MDLN	3	3	3	3	3
17	MKPI	4	4	4	4	4
18	PLIN	3	3	3	3	3
19	PUDP	3	3	3	3	3
20	PWON	3	3	3	3	3
21	RDTX	3	3	3	3	3
22	RODA	3	3	3	3	3
23	SCBD	3	3	3	3	3
24	SMDM	3	3	3	3	3
25	SMRA	3	3	3	3	3

LAMPIRAN 5

Data Variabel Kompensasi Eksekutif

No	Kode Perusahaan	Kompensasi Eksekutif		LOG Kompensasi Eks	
		2011	2012	2011	2012
1	APLN	20.577.885.000	20.989.620.000	10,313	10,322
2	ASRI	11.207.452.000	19.103.591.000	10,050	10,281
3	BAPA	878.350.000	1.005.550.000	8,944	9,002
4	BKSL	15.753.900.050	16.849.048.000	10,197	10,227
5	BSDE	30.305.922.931	27.694.217.283	10,482	10,442
6	CTRA	57.100.000.000	69.100.000.000	10,757	10,839
7	CTRP	11.829.576.129	13.957.690.362	10,073	10,145
8	CTRS	11.000.000.000	13.000.000.000	10,041	10,114
9	DART	14.976.340.000	15.354.548.000	10,175	10,186
10	DILD	37.226.314.185	20.126.771.622	10,571	10,304
11	DUTI	19.152.965.166	14.424.330.000	10,282	10,159
12	GPRA	3.619.048.864	3.040.814.300	9,559	9,483
13	KIJA	11.868.965.621	20.199.768.171	10,074	10,305
14	LAMI	6.097.861.000	6.555.179.000	9,785	9,817
15	LPCK	2.041.087.226	2.041.087.226	9,310	9,310
16	MDLN	9.050.738.417	10.926.411.532	9,957	10,038
17	MKPI	28.224.937.628	29.706.939.688	10,451	10,473
18	PLIN	20.949.074.000	14.172.254.000	10,321	10,151
19	PUDP	1.914.000.000	2.012.000.000	9,282	9,304
20	PWON	6.649.065.000	13.605.018.000	9,823	10,134
21	RDTX	4.682.238.015	5.543.758.252	9,670	9,744
22	RODA	523.000.000	2.011.503.000	8,719	9,304
23	SCBD	13.023.357.000	13.023.357.000	10,115	10,115
24	SMDM	3.938.400.000	3.938.400.000	9,595	9,595
25	SMRA	32.814.701.000	39.407.675.000	10,516	10,596

Data Variabel Kompensasi Eksekutif

No	Kode Perusahaan	Kompensasi Eksekutif		LOG Kompensasi Eks	
		2013	2014	2013	2014
1	APLN	24.875.718.000	25.155.917.000	10,396	10,401
2	ASRI	15.178.764.000	19.814.651.000	10,181	10,297
3	BAPA	1.001.000.000	1.041.000.000	9,000	9,017
4	BKSL	16.643.145.000	14.412.977.000	10,221	10,159
5	BSDE	30.453.887.550	38.891.090.895	10,484	10,590
6	CTRA	74.200.000.000	95.300.000.000	10,870	10,979
7	CTRP	15.298.400.338	20.142.777.720	10,185	10,304
8	CTRS	14.000.000.000	18.000.000.000	10,146	10,255
9	DART	18.171.804.000	19.940.618.000	10,259	10,300
10	DILD	20.666.030.398	19.938.873.825	10,315	10,300
11	DUTI	11.238.000.000	11.592.000.000	10,051	10,064
12	GPRA	2.743.385.400	4.549.805.196	9,438	9,658
13	KIJA	39.359.496.316	33.779.940.297	10,595	10,529
14	LAMI	6.555.869.000	6.570.591.000	9,817	9,818
15	LPCK	6.643.219.822	5.450.669.343	9,822	9,736
16	MDLN	14.383.551.120	23.647.118.361	10,158	10,374
17	MKPI	31.149.286.580	34.311.747.521	10,493	10,535
18	PLIN	16.293.897.000	23.824.175.000	10,212	10,377
19	PUDP	2.703.350.000	3.488.032.000	9,432	9,543
20	PWON	16.464.822.000	22.685.521.000	10,217	10,356
21	RDTX	6.838.329.800	8.896.784.000	9,835	9,949
22	RODA	4.491.950.000	9.481.322.000	9,652	9,977
23	SCBD	13.023.357.000	13.023.357.000	10,115	10,115
24	SMDM	6.868.535.000	13.792.663.000	9,837	10,140
25	SMRA	55.698.456.000	74.399.500.000	10,746	10,872

Data Variabel Kompensasi Eksekutif

No	Kode Perusahaan	Kompensasi Eksekutif	LOG Kompensasi Eks
		2015	2015
1	APLN	16.132.079.000	10,208
2	ASRI	37.051.276.000	10,569
3	BAPA	1.197.000.000	9,078
4	BKSL	6.136.491.000	9,788
5	BSDE	59.578.032.758	10,775
6	CTRA	117.900.000.000	11,072
7	CTRP	24.562.687.903	10,390
8	CTRS	24.000.000.000	10,380
9	DART	14.770.525.000	10,169
10	DILD	35.491.558.362	10,550
11	DUTI	13.405.400.000	10,127
12	GPRA	5.806.121.445	9,764
13	KIJA	63.046.056.819	10,800
14	LAMI	6.441.661.000	9,809
15	LPCK	7.424.830.200	9,871
16	MDLN	27.577.879.651	10,441
17	MKPI	39.242.639.160	10,594
18	PLIN	29.127.724.000	10,464
19	PUDP	3.488.032.000	9,543
20	PWON	37.949.199.000	10,579
21	RDTX	9.003.718.000	9,954
22	RODA	12.772.846.000	10,106
23	SCBD	15.210.843.000	10,182
24	SMDM	21.236.379.000	10,327
25	SMRA	72.752.224.000	10,862

LAMPIRAN 6

Data Variabel ROA

No	Kode Perusahaan	Laba Bersih Setelah Pajak (A)	Asset (B)	ROA (A) / (B)
		2011	2011	2011
1	APLN	684.908.751.000	10.838.820.997.000	0,063
2	ASRI	602.736.609.457	6.007.548.091.185	0,100
3	BAPA	5.901.252.085	148.084.624.723	0,040
4	BKSL	136.450.036.260	5.290.382.916.872	0,026
5	BSDE	1.170.230.504.942	12.787.376.914.156	0,092
6	CTRA	494.011.087.830	11.524.866.822.316	0,043
7	CTRP	168.558.779.854	4.314.646.971.261	0,039
8	CTRS	199.327.063.606	3.529.028.283.751	0,056
9	DART	63.812.322.000	4.103.893.859.000	0,016
10	DILD	147.404.782.398	5.691.909.741.708	0,026
11	DUTI	422.405.402.492	5.188.186.444.790	0,081
12	GPRA	44.854.664.733	1.236.255.766.968	0,036
13	KIJA	326.131.166.919	5.597.356.750.923	0,058
14	LAMI	8.003.904.000	591.979.523.000	0,014
15	LPCK	257.680.751.130	2.041.958.524.823	0,126
16	MDLN	74.117.343.194	2.526.029.716.477	0,029
17	MKPI	323.002.151.219	2.138.597.313.933	0,151
18	PLIN	83.128.263.000	4.232.841.288.000	0,020
19	PUDP	21.020.795.835	340.747.940.166	0,062
20	PWON	378.531.447.000	5.744.711.035.000	0,066
21	RDTX	113.960.451.414	1.082.292.152.075	0,105
22	RODA	12.502.452.430	2.231.729.483.607	0,006
23	SCBD	72.759.761.000	3.478.445.408.000	0,021
24	SMDM	24.837.391.000	2.454.961.990.000	0,010
25	SMRA	388.706.644.000	8.099.174.681.000	0,048

Data Variabel ROA

No	Kode Perusahaan	Laba Bersih Setelah Pajak (A)	Asset (B)	ROA (A) / (B)
		2012	2012	2012
1	APLN	841.290.753.000	15.195.642.352.000	0,055
2	ASRI	1.216.091.539.000	10.946.417.244.000	0,111
3	BAPA	4.488.128.775	159.093.151.873	0,028
4	BKSL	220.926.021.026	10.654.200.606.913	0,021
5	BSDE	1.696.563.824.942	16.756.718.027.575	0,101
6	CTRA	849.382.875.816	15.023.391.727.244	0,057
7	CTRP	319.151.767.553	5.933.874.601.626	0,054
8	CTRS	273.913.555.964	4.428.210.643.555	0,062
9	DART	180.828.252.000	4.293.161.447.000	0,042
10	DILD	200.435.726.378	6.091.751.240.542	0,033
11	DUTI	613.327.842.111	6.592.254.980.112	0,093
12	GPRA	56.281.503.224	1.310.251.294.004	0,043
13	KIJA	380.022.434.090	7.077.817.870.077	0,054
14	LAMI	6.520.851.000	600.183.015.000	0,011
15	LPCK	407.021.908.297	2.832.000.551.101	0,144
16	MDLN	260.474.880.599	4.591.920.046.013	0,057
17	MKPI	363.050.255.701	2.553.203.639.852	0,142
18	PLIN	234.725.164.000	3.950.266.763.000	0,059
19	PUDP	21.137.976.004	361.178.839.947	0,059
20	PWON	766.495.905.000	7.565.819.916.000	0,101
21	RDTX	124.817.978.364	1.207.905.280.350	0,103
22	RODA	70.799.940.574	2.442.055.005.634	0,029
23	SCBD	69.466.498.000	3.558.903.785.000	0,020
24	SMDM	46.319.686.000	2.637.664.776.000	0,018
25	SMRA	792.085.965.000	10.876.386.685.000	0,073

Data Variabel ROA

No	Kode Perusahaan	Laba Bersih Setelah Pajak (A)	Asset (B)	ROA (A) / (B)
		2013	2013	2013
1	APLN	930.240.000.000	19.679.909.000.000	0,047
2	ASRI	889.576.596.000	14.428.082.567.000	0,062
3	BAPA	5.025.737.151	175.635.233.972	0,029
4	BKSL	605.095.613.999	10.654.200.606.913	0,057
5	BSDE	2.905.648.505.498	22.572.292.483.511	0,129
6	CTRA	1.413.388.450.323	20.245.534.912.143	0,070
7	CTRP	442.124.140.880	7.654.148.452.927	0,058
8	CTRS	412.809.066.465	5.770.615.672.410	0,072
9	DART	180.800.291.000	4.768.449.638.000	0,038
10	DILD	329.606.541.861	7.536.320.166.520	0,044
11	DUTI	756.858.436.790	7.473.827.304.875	0,101
12	GPRA	106.511.465.341	1.332.678.268.231	0,080
13	KIJA	104.477.632.614	8.257.711.872.648	0,013
14	LAMI	54.340.019.000	611.947.289.000	0,089
15	LPCK	590.616.930.141	3.854.166.345.345	0,153
16	MDLN	2.451.686.470.278	9.560.059.574.401	0,256
17	MKPI	365.563.078.058	2.838.815.438.871	0,129
18	PLIN	33.342.916.000	4.126.804.890.000	0,008
19	PUDP	26.378.888.591	366.527.525.516	0,072
20	PWON	1.136.547.541.000	9.298.245.408.000	0,122
21	RDTX	198.229.841.964	1.549.781.893.503	0,128
22	RODA	376.806.804.889	2.750.896.836.038	0,137
23	SCBD	1.754.524.211.000	5.551.173.684.000	0,316
24	SMDM	26.471.209.000	2.950.314.446.000	0,009
25	SMRA	1.095.888.248.000	14.255.000.367.000	0,077

Data Variabel ROA

No	Kode Perusahaan	Laba Bersih Setelah Pajak (A)	Asset (B)	ROA (A) / (B)
		2014	2014	2014
1	APLN	983.875.000.000	23.686.158.000.000	0,042
2	ASRI	1.176.955.123.000	16.924.366.954.000	0,070
3	BAPA	7.046.505.796	176.171.620.663	0,040
4	BKSL	40.479.371.011	9.986.973.579.779	0,004
5	BSDE	3.993.986.971.902	28.206.859.159.578	0,142
6	CTRA	1.794.593.760.029	23.538.715.238.878	0,076
7	CTRP	399.035.071.266	8.861.336.553.234	0,045
8	CTRS	584.398.807.464	6.121.813.757.452	0,095
9	DART	408.025.799.000	5.114.273.658.000	0,080
10	DILD	432.778.419.324	9.007.692.918.375	0,048
11	DUTI	698.952.189.429	8.130.786.587.766	0,086
12	GPRA	92.228.024.751	1.517.576.344.888	0,061
13	KIJA	398.826.621.307	8.508.937.032.120	0,047
14	LAMI	38.386.668.000	631.282.689.000	0,061
15	LPCK	845.971.817.517	4.390.498.820.383	0,193
16	MDLN	706.295.408.232	10.359.146.927.433	0,068
17	MKPI	437.863.861.821	4.316.214.269.222	0,101
18	PLIN	358.995.455.000	4.544.932.176.000	0,079
19	PUDP	14.813.119.705	402.028.832.604	0,037
20	PWON	2.598.832.017.000	16.770.742.538.000	0,155
21	RDTX	223.073.393.824	1.643.386.438.778	0,136
22	RODA	517.435.577.464	3.067.758.337.733	0,169
23	SCBD	131.764.378.000	5.570.748.962.000	0,024
24	SMDM	44.039.549.000	3.156.290.546.000	0,014
25	SMRA	1.617.479.556.000	15.872.671.877.000	0,102

Data Variabel ROA

No	Kode Perusahaan	Laba Bersih Setelah Pajak (A)	Asset (B)	ROA (A) / (B)
		2015	2015	2015
1	APLN	1.116.763.447.000	24.559.174.988.000	0,045
2	ASRI	684.287.753.000	18.709.870.126.000	0,037
3	BAPA	1.204.642.974	175.743.601.667	0,007
4	BKSL	61.673.665.333	11.145.896.809.593	0,006
5	BSDE	2.351.380.057.145	36.022.148.489.646	0,065
6	CTRA	1.740.300.162.426	26.258.718.560.250	0,066
7	CTRP	349.721.640.896	9.824.081.455.343	0,036
8	CTRS	660.112.214.917	6.980.936.478.570	0,095
9	DART	177.765.808.000	5.739.863.241.000	0,031
10	DILD	419.044.195.464	10.288.572.076.882	0,041
11	DUTI	670.949.496.747	9.014.911.216.451	0,074
12	GPRA	72.893.324.167	1.574.174.572.164	0,046
13	KIJA	331.442.663.161	9.740.694.660.705	0,034
14	LAMI	153.538.451.000	640.519.368.000	0,240
15	LPCK	914.989.279.214	5.476.757.336.509	0,167
16	MDLN	873.420.195.958	12.843.050.665.229	0,068
17	MKPI	889.628.865.732	5.709.371.372.467	0,156
18	PLIN	279.689.919.000	4.671.089.985.000	0,060
19	PUDP	27.591.952.360	445.919.320.351	0,062
20	PWON	1.400.554.118.000	18.778.122.467.000	0,075
21	RDTX	256.262.501.350	1.872.158.609.529	0,137
22	RODA	479.642.073.280	3.232.242.644.731	0,148
23	SCBD	159.356.318.000	5.566.425.030.000	0,029
24	SMDM	75.239.795.000	3.154.581.181.000	0,024
25	SMRA	1.064.079.939.000	18.758.262.022.000	0,057

LAMPIRAN 7

Data Variabel Karakter Eksekutif

No	Kode Perusahaan	<i>EBITDA / Total Asset</i>					<i>RISK</i>
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	APLN	0,103	0,105	0,097	0,084	0,104	0,009
2	ASRI	0,115	0,126	0,081	0,083	0,053	0,029
3	BAPA	0,067	0,051	0,056	0,060	0,029	0,014
4	BKSL	0,040	0,029	0,068	0,013	0,015	0,022
5	BSDE	0,153	0,154	0,190	0,182	0,103	0,034
6	CTRA	0,085	0,099	0,111	0,105	0,100	0,010
7	CTRP	0,144	0,136	0,136	0,115	0,111	0,014
8	CTRS	0,108	0,111	0,124	0,140	0,139	0,015
9	DART	0,035	0,066	0,060	0,106	0,051	0,027
10	DILD	0,055	0,067	0,074	0,067	0,059	0,007
11	DUTI	0,098	0,110	0,163	0,134	0,122	0,025
12	GPRA	0,063	0,077	0,112	0,077	0,065	0,020
13	KIJA	0,113	0,111	0,076	0,122	0,104	0,018
14	LAMI	0,242	0,305	0,204	0,167	0,349	0,074
15	LCK	0,168	0,178	0,187	0,198	0,184	0,011
16	MDLN	0,079	0,094	0,284	0,089	0,094	0,087
17	MKPI	0,444	0,429	0,435	0,310	0,336	0,063
18	PLIN	0,171	0,253	0,202	0,253	0,245	0,037
19	PUDP	0,300	0,300	0,315	0,273	0,294	0,015
20	PWON	0,134	0,163	0,182	0,181	0,101	0,034
21	RDTX	0,406	0,403	0,391	0,299	0,299	0,056
22	RODA	0,011	0,035	0,149	0,167	0,146	0,073
23	SCBD	0,126	0,134	0,428	0,137	0,134	0,132
24	SMDM	0,032	0,047	0,040	0,042	0,059	0,010
25	SMRA	0,087	0,111	0,111	0,143	0,096	0,021

LAMPIRAN 8

Hasil Uji Outer Model

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>Standard Error (STERR)</i>	<i>T Statistics (O/STERR)</i>
ETR <- ETR	1,000000	1,000000	0,000000		
KUA <- CG	0,832536	0,664658	0,298404	0,298404	2,789961
KA <- CG	-0,374904	-0,413598	0,249747	0,249747	1,501137
LKOM <- CG	-0,123227	-0,446873	0,281552	0,281552	0,437671
RISK <- RISK	1,000000	1,000000	0,000000		
ROA <- ROA	1,000000	1,000000	0,000000		



LAMPIRAN 9

Hasil Uji *Inner Model*

R Square

	<i>R Square</i>
ETR	0,236237



LAMPIRAN 10

Hasil Uji Hipotesis

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>Standard Error (STERR)</i>	<i>T Statistics (/O/STERR/)</i>
GCG -> ETR	0,177075	0,173514	0,085054	0,085054	2,081910
RISK -> ETR	0,267066	0,253291	0,089306	0,089306	2,990476
ROA -> ETR	-0,455692	-0,453194	0,060163	0,060163	7,574324



